

AKTUAL

Edisi 29 | Tahun ke-2 | Desember 2014

CENGKRAMAN CINA DI INDONESIA

Kerjasama pertahanan Indonesia-China yang semakin meningkat punya arti penting dan strategis bagi kedua negara. Indonesia harus pintar memposisikan diri di tengah persaingan China dan Amerika.





POLITIK URBANITA

INTERNASIONAL

INTERNASIONAL EKONOMI-BISNIS

URBANITAS

AKTUALISASI MASYARAKAT!

TEKNOGET

SOSIAL

JAJAN-JAJAN

OTOMOTIF

WARISAN BUDAYA

HUKUM

ENERGI

OLAHRAGA

OASE KEHIDUPAN

<http://www.facebook.com/aktual.co>
<http://www.twitter.com/aktual.co>

AKTUAL

PENDIRI M Daniyal Nafis
KOMISARIS Yudi Latif
PEMIMPIN REDAKSI Dha Prekasha Yoedha
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dha Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhyony
DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhyony
REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Neby Muhabirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito
ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Saeful Anwar, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusup, Ferro Maulana
STAF REDAKSI Soemiro-Deddy Kusnaedi-Moh Sahlan (Majalah), Fadlan Syam Butto, Fitria Damayanti, Indra Tjaya, Maulana Khamal Macharani, Mohammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Syahrul Saleh, Vina Fatma Sari, Nicha Muslimawati, Acep Nazmudin (foto), Munzir (Foto), Junaidi (Foto), Warnoto (TV)

IT Radius Rasmangun, Yudi Astira
DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, WM Desangga, Nelson Nafis

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendorfa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmad Harris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhsin (Bojonegoro), Ikbah Kukuh (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim).

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febrianto
DIREKTUR OPERASIONAL Ririn Sukmariana
MANAGER KEUANGAN Kasep Nataku sumah
STAF KEUANGAN Zulkifli
SIRKULASI Widhi Maulana
MARKETING OFFICER Boby Ciputra
PERSONALIA Nurlaili Qadr

ALAMAT REDAKSI
PT Caprof Media Negeri
Cawang Kencana Building
1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang
DKI Jakarta 13630 Indonesia
No Telp. : (021) 8005520
Fax : (021) 80886466
Email : majalah@aktual.co
iklan@aktual.co

aktual.co
TERHANGAT TERPERCAYA

aktualTV

Ikat Pinggang Jokowi

Tahun 1960 penduduk China telah mencapai 682 juta jiwa lebih. Pada tahun yang sama penduduk Uni Soviet tercatat 214,2 juta jiwa. Sementara rakyat Indonesia baru mencapai sekitar 97 juta orang lebih. Semasa itu persaingan dua kubu pemenang Perang Dunia II, antara Blok Barat dipimpin Amerika Serikat dkk dengan Blok Timur dipimpin Uni Soviet (sekarang menjadi Rusia dan Commonwealth Independent State - CIS) dkk, mulai memuncak menjadi Perang Dingin.

Pimpinan kedua Blok pun berlomba menanamkan pengaruh sedalam mungkin ke berbagai negara lain yang berpotensi mendukung kepentingan global mereka. Berbagai pendekatan pun ditempuh melalui tawaran bantuan, mulai dari ranah militer, sosial budaya, maupun ekonomi. Sehingga gejolak di tiap kawasan dan benua mana pun tak terlepas dari kepentingan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur.

Suatu kali Ketua Partai Komunis China (PKC), Mao Zedong mendapat laporan dari staf di politbiro, bahwa puluhan provinsi padat penduduk kini terancam bencana kelaparan akibat gagal panen dan banjir besar. Paling tidak ada 200 juta lebih penduduk Cina akan terancam kelaparan. Padahal kondisi keuangan dan stok pangan China sedang kembang kempis.

Mao pun bergegas ke meja telepon *hotline* di ruang kerjanya. Diangkatnya gagang telpon berwarna merah, lalu Mao memutar *dial* nomer internasional berkode 007495. Itulah kode area untuk Kremlin, Moskow, tempat pucuk pimpinan tertinggi Blok Timur bersemayam. Di ujung sana, Nikita Kruschev pimpinan tertinggi Uni Soviet pun segera mengangkat telepon yang berdering itu. Dia langsung menyampaikan salam, "Apa kabar kamerad Mao?"



Dengan segera Mao menyampaikan perlu bantuan pangan segera untuk memberi makan 200 juta rakyat China yang terancam kelaparan. Selaku sekutu utama Blok Timur, Mao menegaskan, sangat wajar jika Beijing meminta bantuan Moskow.

Atas permintaan itu, Kruschev bingung karena posisi keuangan Uni Soviet pun tengah terpepet akibat tersedot kepentingan strategis membiayai pengadaan prasarana rudal nuklir di Kuba. Apalagi bantuan pangan bagi 200 juta lebih rakyat China itu sama dengan memberi makan seluruh rakyat Uni Soviet.

Namun agar tidak menyakiti hati mitra utamanya dalam menghadapi "setan dunia" Inggris Amerika, Kruschev pun menenangkan kegugupan Mao. "Sabar kamerad Mao, sabar. Saran kami tolong kalian kencangkan ikat pinggang dulu," katanya.

Mendengar tanggapan itu karuan Mao kesal. Karena kas negara RRC dan PKC juga tengah ludes akibat membiayai bentrok perbatasan China dengan India. Jangankan membeli gandum, membuat seutas tali dari secarik kain pun, Beijing sudah tidak punya uang.

Atas tanggapan Kruschev, 'politisi preman' yang dalam suatu sidang di PBB pernah menggunakan sepatunya untuk mengetuk-ngetuk meja untuk tanda interupsi itu, maka Mao tanpa canggung lagi langsung menukas. "Baik kamerad Kruschev, kalau begitu tolong segera kirimi kami sedikitnya 200 juta ikat pinggang."

Tapi itu dulu, 50 tahun yang lalu. Sekarang baik China maupun Rusia mungkin tak berselisih faham soal ikat pinggang lagi. Karena mereka kini sama-sama tertarik pada sabuk mutu manikam khatulistiwa, alias tol laut sehampir nusantara. Boleh jadi, Jokowi yang kini butuh ikat pinggang. ■

Daftar Isi

Edisi 29 | Tahun ke-2 | Desember 2014

Laporan Utama

18 ISTANA RAKYAT TERLARANG UNTUK RAKYAT

Mengubah istana negara menjadi istana rakyat sempat didengungkan Joko Widodo (Jokowi) semasa awal terpilih menjadi Presiden.



24 MENTERI RINI DENGAN PENDINGIN DAN CALON BOS ASING

Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla ini mencuri perhatian media dengan mewacanakan ide menjual Gedung Kementerian BUMN alias kantornya sendiri.



26 Mendagri Tjahjo Kumolo: MENGGEBRAK DI LUAR MERIANG DI DALAM

Tjahjo memang langsung unjuk gigi dan ceplas-ceplos mengomentari berbagai masalah.



28 CEPAT-CEPAT ASAL SELAMAT

Usai pesta perpisahan digelar, Laoly langsung tancap gas. Setumpuk pekerjaan yang ditinggalkan Amir Syamsuddin langsung digarap.



12 POLITIK Menggugat Saudara Tua



16 NASIONAL Ganti Rezim Ganti Buku



32 HUKUM

Mencari Penumpang Gelap Bailout Century



36 SEJARAH

Bulan Madu Soekarno - Mao Zedong



40 ENERGI

Petral Takkan Bubar



44 EKONOMI

AIIB: Harapan Baru?



50 INTESTASI

Cengkeraman Cina di Indonesia



54 INTERNASIONAL

Membina "Keakraban" TNI dan Militer Cina



58 INTERNASIONAL

Brutalitas CIA



3 Tatap Redaksi

5 Surat Pembaca

6 Kaki Hari

8 Kilas Nasional

10 Lensa Aktual

14 Kilas Politik

24 Kilas Hukum

40 Kilas Energi

48 Kilas Ekonomi

60 Kilas Nusantara

70 Oase



Dapatkan Majalah Digital Aktual di:

aktual.co
TERHANGAT TERPERCAYA

Hapuskan Kredit TKI ...!!!



Dalam sebuah telekonferensi dengan para TKI di Taiwan, Presiden Jokowi mendapat pengaduan terkait pungli atau besarnya potongan gaji yang terlalu tinggi dan mencekik. Bawa biaya resmi penempatan tenaga kerja di Taiwan sebesar Rp18,4 juta. Namun TKI Taiwan ditarik sampai Rp50-60 juta per orang yang di bayar oleh TKI melalui potongan gaji selama 9 bulan pertama bekerja.

Biaya penempatan yang sangat tidak manusiawi melalui skema kredit yang di berikan oleh Lembaga Keuangan Pemberi Pinjaman Pembiayaan Penempatan Calon TKI justru izinnya di berikan oleh BNP2TKI melalui surat Nomor: PENG./PEN/IX/2013, dan disinyalir di balik lembaga lembaga tersebut adalah pemilik PPTKIS/PJTKI.

Jika pemerintahan Jokowi serius ingin memberantas pungli harus pada penyelesaian akar persoalan, maka berikan perlindungan dengan meninjau ulang standar biaya penempatan TKI yang lebih manusiawi dan tidak memberatkan TKI. Dan saat ini Kemenaker yang membuat kebijakan sejak era Muhammin Iskandar justru melakukan pemberian.

Pemakaian utang melalui Sistem Kredit TKI saat ini bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah karena TKI masih saja terjerat utang dan harus membayar biaya potongan dan menurut kami ini adalah kejahatan utang.

Bawa dalam peraturan di negara penempatan seperti Taiwan dan Hongkong biaya biaya seperti tiket pesawat, visa dan paspor seharusnya ditanggung oleh pengguna jasa atau majikan serta ditentukan biaya penempatan yang harus ditanggung oleh TKI hanya 1 bulan gaji.

Kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah dalam pemberian sistem tata kelola perlindungan TKI harus bersifat partisipatoris dengan melibatkan para TKI. Karena mereka yang menjalani dan merasakan apakah kebijakan itu adil buat mereka, maka kebijakannya harus mengedepankan sisi perlindungan bukan semata mata karena bisnis saja. Mereka TKI adalah manusia bukan

barang, maka berikan hak-hak dan perlindungannya.

Untuk itu perlu penghapusan Sistem Kredit TKI yang memaksa dan mencekik TKI; Biaya penempatan TKI harus di tanggung Pengguna atau Majikan dan libatkan TKI dalam pengambilan kebijakan.

Jamaludin Suryahadikusuma

Koordinator Federasi Organisasi Migran Indonesia (Formigran) Indonesia

Perlu Penafsiran UU BPJS ke MK

Perlu penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Penafsiran ke MK ini sangat perlu agar ada kepastian hukum. Terdapat dua pasal dalam UU BPJS yang akan perlu penafsiran MK. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 11 Huruf h dan Pasal 17 Ayat (2) Huruf c.

Dalam Penjelasan UU BPJS, Pasal 11 Huruf h menyatakan kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan bantuan iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Pasal lain yakni, Pasal 17 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam "pelayanan publik tertentu" antara lain pemrosesan ijin usaha, ijin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan. Pada Penjelasan Pasal 11 huruf h, yang dimaksud pemberi iuran itu kan pemerintah/pemerintah daerah. Apa bentuk kerja samanya dengan BUMN/BUMD?

Kalau dengan pemerintah tidak perlu kerja sama karena sudah menjadi kewajiban pemerintah. Sementara, Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) huruf c tidak sesuai dengan hakikat arti pelayanan kesehatan.

Atas dasar itulah, sangat diperlukan penafsiran MK agar ada kepastian hukum sanksi administrasi bagi pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran kepesertaan BPJS.

Fathul Mu'in

Direktur Riset dan Advokasi Pusat Studi Nusantara (Pustara)

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.



KAKI HARI
YUDI LATIF

Apakah Gerangan 'Semangat Proklamasi' itu?

"Semangat proklamasi," ujar Soekarno di ulang tahun kelima kemerdekaan Indonesia, "adalah semangat *rela berjoang, berjoang mati-mati* dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat proklamasi adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat-mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat proklamasi adalah semangat membentuk dan membangun Negara...Dan manakala sekarang tampak tanda-tanda kelunturan dan degenerasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu, hidupkanlah kembali semangat proklamasi!"

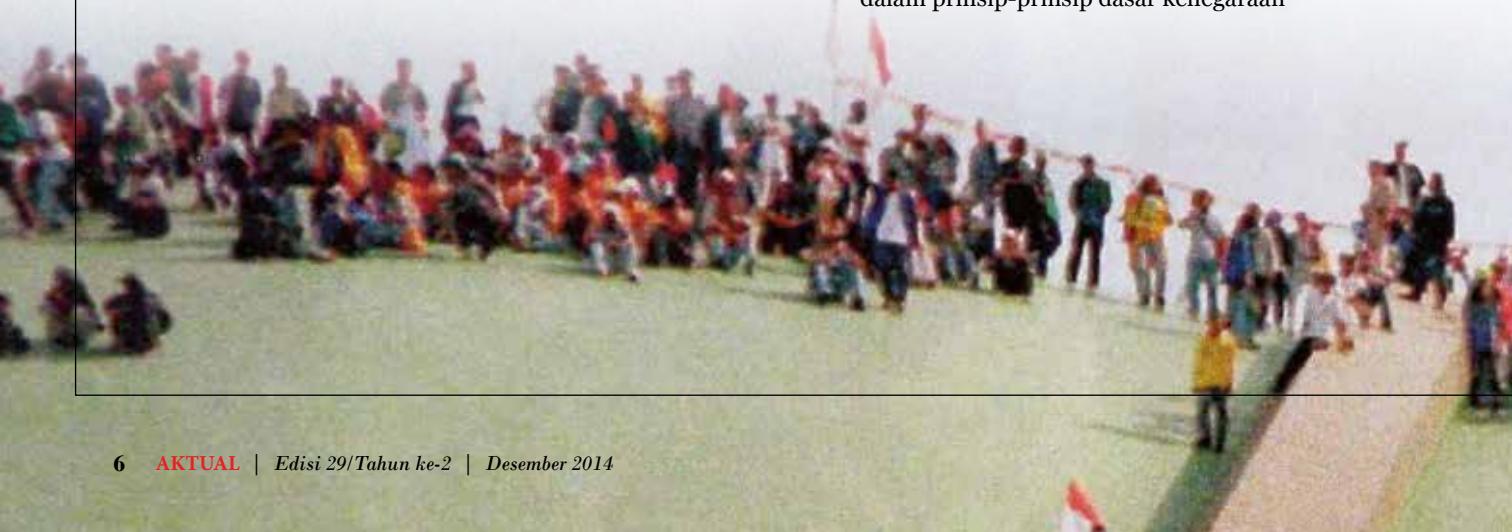
Masih adakah idealisme dan semangat berjoang di antara kita? Masih. Mahasiswa dan masyarakat madani turun kejalan, memekikkan reformasi, membebaskan negeri dari cengkraman tirani. Selepas kejatuhan Suharto, pelbagai langkah demokratisasi prosedural telah ditempuh dengan transformasi yang nyata: amandemen konstitusi, pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif fair, kebebasan berekspresi, keluasan akses informasi, desentralisasi dan otonomisasi, kehadiran institusi-institusi kenegaraan baru serta pemilihan presiden dan pilkada secara langsung. Di luar arena politik, kekuatan-kekuatan swadaya masyarakat menceburkan diri di

zona-zona bencana dengan ketulusan patriotis yang mengharukan. Terkenang juga para pendekar kebudayaan yang secara berdikari mengirimkan talenta-talenta terbaik bangsa ke ajang kompetisi internasional—semacam olimpiade fisika atau festival kesenian—dan pulang dengan medali tertinggi.

Hanya saja, seperti kata sejarawan H.G. Wells, "*Anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekad yang dimilikinya.*" Kita punya idealisme reformasi, tetapi mudah surup oleh kepentingan-kepentingan sempit dan partikular. Kita bentuk partai politik untuk mengagregasikan aspirasi rakyat, namun lekas terpasung oleh ambisi-ambisi elitis. Kita susun undang-undang baru demi kebijakan bersama, namun terdistorsi oleh kemauan "yang kuat". Kita pilih presiden dan pilkada secara langsung demi pemberdayaan rakyat, namun mudah terbajak oleh kekuatan-kekuatan oligarkis. Kita lahirkan cerlang-cerlang individual, namun terbunuh oleh inkonsistensi dan kealpaan sistem meritokrasi.

Masih adakah semangat persatuan di antara kita? Masih. Bahasa Indonesia makin penting sebagai lingua franca, perkawinan antaretnis pun merekatkan keindonesiaan. Elite settlement untuk mentransformasikan elit berseteru menjadi elit bersatu dalam prinsip-prinsip dasar kenegaraan

"Berapa kali kau katakan, negara sedang sakit; sedang engkau adalah penyakit itu. Tunjuk hidung adalah kebiasaanmu; sedang engkau tak tampak menjaga kehormatannya."



mengalami kemajuan. Fanatisisme ideologis, yang mengubur eksperimen demokrasi parlementer, relatif makin cair. Piagam Jakarta tak lagi menjadi obsesi arus utama politik Muslim. Mayoritas elit mendukung amandemen konstitusi. Tentara rela keluar dari arena politik. Desentralisasi dan distribusi kekuasaan diterima sebagai keniscayaan. Solidaritas nasional juga terasa di kala bencana mendera.

Hanya saja, solidaritas emosional tersebut mudah roboh oleh kelemahan solidaritas fungsional, karena tak terpenuhinya cita-cita kebijakan dan kesejahteraan bersama. Solidaritas dan demokrasi, menurut Alexis de Tocqueville, memiliki makna di luar politik dan budaya: yakni kesederajatan sosial dan ekonomi. Kesetaraan sosial-ekonomi memunculkan hasrat membentuk asosiasi-asosiasi yang terbuka, tanpa melihat dan dibedakan menurut silsilah. Pada gilirannya, perkumpulan ini melindungi kesetaraan dengan mencegah kelompok lain menjadi dominan. Dengan demikian perkumpulan ini memiliki dua fungsi: mereka berasal dari dan menjaga solidaritas dan demokrasi. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, menyimpan potensi erupsi, laksana bara dalam sekam yang dalam sekejap bisa menghanguskan ikatan-ikatan persatuan.

Masih adakah semangat membangun negara di antara kita? Masih. Alim-ulama ingatkan kebangkrutan moral, aparat pembasmi korupsi mulai beraksi, politisi

pecundang perankkan oposisi, tentara lepaskan aktivitas niaga, pendidik rela berupah rendah, lembaga-lembaga pemantau bersitumbuh, media massa giat beberkan keborongan, pengamat aktif mengkritisi.

Hanya saja, kita mengalami krisis keteladan dan kepemimpinan. Seperti sindir syair Arab, "Berapa kali kau katakan, negara sedang sakit; sedang engkau adalah penyakit itu. Tunjuk hidung adalah kebiasaanmu; sedang engkau tak tampak menjaga kehormatannya." Terlalu banyak yang mengeluh dan terlalu sedikit yang memberi contoh.

Mohammad Hatta pernah berkata: "Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan." Ketika para pemimpin negeri berpesta menikmati gaji ke-13, sibuk "jaga imej" atau memenangkan proyek, sedang rakyat banjir airmata dilanda bencana, menjadi jelas terukur bagaimana kualitas para pemimpin kita.

Sementara para pemimpin berpesta, arus neo-kolonialisme yang membongeng globalisasi semakin luas cakupannya, instan kecepatannya, dan dalam penetrasinya. Secara perlahan kantong-kantong usaha rakyat tergusur, sumberdaya alam terkuras, dan aktiva ekonomi mengalir ke pusat-pusat metropolis. Ledekan Profesor Veith dari masa lampau makin menikam di ulu hati: "Di pantainya tanah Jawa rakyat berdesak-desakan; datang selalu tuan-tuannya setiap masa; mereka beruntun-untun sebagai runtunan awan; tapi anak-anak negeri sendiri tak pernah kuasa".

"Kualitas pemimpin sepadan dengan caranya mendapat makan"

Mohammad Hatta



Ibas Yakin SBY Mampu Pimpin Demokrat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memprediksi Susilo Bambang Yudhoyono akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi di Kongres 2015. "Dinamika menjelang Kongres Partai Demokrat (PD) mendatang akan diwarnai desakan kader di daerah agar SBY dipilih secara aklamasi sebagai Ketum," kata Ibas dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/12).

Ibas yakin dinamika yang berkembang pada akhirnya akan menegaskan SBY sebagai Ketum secara aklamasi yang diterima semua kader. Menurut dia, kader Demokrat rasional dan ke depan menginginkan memiliki masa depan yang cerah sehingga pantas jika banyak kader yang menginginkan SBY memimpin kembali. "Kader juga ingin Pak SBY mengayomi kita semua menuju Indonesia yang lebih aman, adil, demokratis, sejahtera dan dihormati dunia," ujarnya.

Ibas juga yakin bahwa figur SBY mampu mengembalikan kejayaan

Partai Demokrat sehingga tidak ada yang menyangkal kalau SBY sebagai figur perekat dan pasti bisa diterima oleh seluruh kader Demokrat. Dia menjelaskan menjelaskan adanya aspirasi kader demokrat itu karena keberhasilan SBY baik sebagai kader utama PD maupun Presiden RI sudah dibuktikan secara baik selama 10 tahun menjalankan amanah rakyat. "Sebagai presiden RI ke-6 beliau berhasil membangun melalui program-program pro-rakyat, pro-job, pro-business, pro-growth, pro-environment, pro-demokrasi, dan pro-international relations," kata Ibas.

Selain itu Ibas optimis partainya akan terus berada di jalur demokratis dalam memilih pemimpin karena sebagai partai yang relatif muda, PD sudah belajar dari sejumlah

pengalaman. Menurut dia, kader sadar dan tidak akan mengulangi kejadian kelam di masa lalu ketika Demokrat melepas demokrasi dalam memilih kepemimpinan yang berujung kepada ketidaksolidan bagi sejumlah orang-orang tertentu. "Karena itu, saat ini kami sepakat yang terbaik adalah mencari tokoh penentu, pengayom dan bisa membawa kejayaan kembali Demokrat ke depan dan tokoh tersebut adalah Pak SBY," katanya.

Dia yakin SBY dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan sekaligus memiliki sikap kenegarawan, sikap tengah yang bijak, akan membawa kembali Demokrat di jalur kemajuan dan masa-masa emas. Bursa Ketum Partai Demokrat juga diramaikan dengan majunya politisi asal Bali Gede Pasek Suardika dan pengurus DPP Demokrat Akbar Yahya Yogerasi yang mencalonkan diri sebagai caketum.

/ Nebby Mahubirrahman



Menkumham Minta Golkar Islah



Dualisme dalam kepengurusan Partai Golkar belum tuntas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak mengesahkan akta perubahan kepengurusan yang dikirimkan oleh kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. Demi kebesaran Golkar, supaya tidak ada perbedaan pendapat, saya minta Partai Golkar selesaikan (konflik) terlebih dulu,

musyawarah mufakat di internal Partai Golkar," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Yasonna yakin bahwa Golkar dapat menyelesaikan konflik dengan aturan yang berlaku di internal partainya. Terlebih dengan turun tangannya sesepuh Golkar, ia yakin penyelesaian konflik dapat terwujud lebih cepat. "Dua kubu adalah bersaudara, saling kenal dekat, saling membangun Partai Golkar. Kami percaya internal Golkar bisa menyelesaikan dengan cepat," ujarnya.

Menurut Yasonna, Golkar dapat menentukan mekanisme penyelesaian konflik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai beringin itu. Jika mahkamah partai tidak dapat menyelesaikan, maka masalah itu

bisa dibawa ke pengadilan.

Yasonna ingin memastikan bahwa pemerintah ada di posisi netral dan tidak memiliki hak mencampuri urusan internal Golkar. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, khususnya Pasal 24. "Kita serahkan pada mekanisme internal Golkar. Mahkamah partai, atau kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan, kecuali kedua pihak islak, dan itu terserah Partai Golkar," ujarnya.

Perpecahan di tubuh Golkar lahir dari munculnya dua musyawarah nasional (munas) yang digelar di waktu dan lokasi berbeda. Munas yang digelar di Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun munas di Jakarta, yang digelar setelah Munas Bali, menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal. / Sukardjito

TNI Bangun Kodam di Manokwari

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan."Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari," ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.

Saat ini, kata Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan,



pembangunan Kodam baru di Papua Barat akan berlangsung pada 2015. Pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI."Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Kodam di Papua."Penambahan Kodam di Papua sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah

mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).

Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh."Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.

Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua."Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya. /Nebby Mahbubirrahman

Masyarakat Ragukan Jaksa Agung Prasetyo

Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan bahwa masyarakat masih ragu dengan potensi Jaksa Agung HM Prasetyo. Responden yang meyakini Prasetyo bisa independen dalam menegakkan hukum jumlahnya 40 persen. Sementara itu, 46 persen responden mengaku tidak tahu, dan 12,1 persen menilai Prasetyo tidak mampu menegakkan hukum secara independen."Ketika ditanya apakah Jaksa Agung saat ini akan mampu memperbaiki citra Kejaksaan dan menegakkan hukum dengan adil, sebanyak 46 persen mengatakan tidak tahu, 40 persen menyatakan mampu, dan 12,1 persen mengatakan tidak mampu," kata CEO Cyrus, Hasan Nasbi, di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Survei ini dilakukan selama 1



hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (*margin of error*) lebih kurang 3,1 persen.

Menurut Hasan, keraguan masyarakat atas kinerja Prasetyo bertambah setelah diberikan informasi mengenai latar belakang Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem. "Yang menyatakan mampu turun sedikit menjadi 38,3 persen, yang menyatakan tidak mampu 18,3 persen dan yang menjawab tidak tahu 43,5 persen," ujar Hasan.

Politikus Golkar Misbakhun yang hadir dalam acara pemaparan survei tersebut menilai ada tarik

menarik kepentingan luar biasa yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Misbakhun mengingatkan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Jokowi berkeinginan jika posisi Jaksa Agung ditempati orang non-partai."Tapi mendadak yang jadi Jaksa Agung justru dari parpol. Kita (DPR), dua bulan sebelumnya, atau empat bulan sebelumnya sudah sangat tahu Nasdem sangat inginkan punya Jaksa Agung. Ada tarik ulur kuat siapa Jaksa Agung," ucap Misbakhun.

Selain melihat gambaran mengenai sosok Jaksa Agung, survei Cyrus juga memperlihatkan penilaian masyarakat terhadap Kabinet Kerja Jokowi-Kalla. Secara umum, menurut Cyrus, masyarakat menilai Kabinet Kerja sebagai kabinet yang biasa saja. Responden yang menilai Kabinet Kerja bagus dan kompeten kurang dari 50 persen. Sementara itu, 8,5 persen menganggap buruk Kabinet Kerja dan 40 persen responden cenderung netral. /Nebby Mahbubirrahman





Peringatan Hari Bela Negara

Para pelajar sekolah dasar memberi hormat kepada bendera merah putih berukuran raksasa pada upacara peringatan Hari Bela Negara di Jakarta, Jumat (19/12). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiyatno menjadi inspektur upacara, sementara I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai atau yang lebih akrab dikenal sebagai Ade Rai bertindak sebagai pemimpin upacara.

Aktual - Tino Oktaviano

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berang dengan sikap saudara tuanya, DPR RI. Pasalnya dalam pengambilan keputusan tingkat pertama dan tingkat kedua Revisi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPD tidak dilibatkan.

Proses revisi yang disebut cacat formil karena DPR ternyata lebih mementingkan kekuasaan dua kelompok yang ada di parlemen dibandingkan mengutamakan kepentingan konstitusi dalam proses legislasi.

Dua kepentingan di DPR dimaksud adalah Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dua kubu yang berseberangan paska gelaran pemilihan presiden 2014. KMP diketahui kelompok yang mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, sementara KIH mendukung pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

“Kita tidak menyangka kalau kami terlalu direndahkan seperti ini,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Gede Pasek Suardika, kepada Aktual, Kamis (11/12) pekan lalu.

Mayoritas anggota DPD disampaikan senator asal Bali itu, mempermasalahkan sikap DPR. Sejak ada kesepakatan dua kubu di DPR, dimana salah satu butir kesepakatannya adalah revisi UU MD3, DPD sudah mencium gelagat tidak baik dari DPR.

Awalnya, setelah diprotes keras pada pembahasan awal DPR menjanjikan untuk mengakomodir DPD. Janji tinggal janji, dalam pembahasan singkat di Ruang Pansus B Kompleks Senayan, 5 Desember lalu, DPD kembali dilecehkan. Sebagian anggota fraksi masih mempermasalahkannya sehingga DPD mengambil sikap *walkout*.

“Mayoritas anggota DPD menentang sikap DPR, ini sudah diputuskan DPD sebelum revisi UU MD3 disahkan. Kita pasti akan mempermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Pasek.

Revisi UU MD3 sendiri akhirnya



MENGGUGAT SAUDARA TUA

Oleh: Soemitro

disahkan DPR. Pengesahannya disyukuri KMP dan KIH dengan mengadakan pemotongan tumpeng. Substansi perubahan UU MD3 yang dikebut selama tiga hari itu dikatakan Ketua Pansus Revisi UU MD3 Saan Mustopa menyangkut delapan pasal.

Pasal-pasal itu mengatur hak interpelasi, hak bertanya, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. Kemudian jumlah kursi wakil ketua untuk 11 Komisi dan 5 alat kelengkapan dewan (AKD) ditambah satu, dari semula tiga menjadi empat.

Aturan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat negara apabila tidak melakukan rekomendasi DPR juga

ditiadakan.

Secara keseluruhan delapan pasal itu ada pada Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 152 ayat (2).

Usai masa reses, 5 Januari 2015, DPD segera melayangkan gugatan ke MK. Yakni setelah menggelar rapat internal sekaligus menunggu penomoran UU MD3 oleh Sekretariat Negara. DPD meyakini gugatannya akan dikabulkan MK, apalagi pengesahan Revisi UU MD3 oleh DPR secara langsung juga melecehkan MK.

Pasalnya DPR tidak menghormati



(Foto Kiri) Gede Pasek Suardika.

Koalisi Indonesia Hebat
melakukan konferensi pers.

putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 mengenai pengembalian kewenangan legislasi DPD. Putusan ini sejalan dengan amanah Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Di saat DPD dikecewakan DPR, secara bersamaan senat mendapatkan 'kebahagiaan' dari pemerintah. Kehadiran puluhan menteri dari Kabinet Kerja Jokowi-JK ke DPD, ketimbang DPR, hal membahagiakan tersebut.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyatakan kehadiran menteri-menteri Jokowi dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengan pendapat (RDP) dengan senat itu tidak ada rekayasa dibelakangnya. Dalam catatannya, hingga kini sudah ada 17 yang menghormati undangan DPD ketimbang DPR.

"Hampir separuh Menteri telah memenuhi undangan DPD. Tak heran ada media yang menulis 'DPD RI lebih baik dibandingkan DPR RI', katanya.

Meski begitu, DPD menekankan agar tidak terbuai dengan penilaian positif publik. Bagaimanapun, kerja-

kerja DPD harus tetap dikedepankan sejalan dengan amanah rakyat yang diembannya.

Pengamat politik UGM Arie Sudjito menilai kooperatifnya pemerintah dengan DPD karena merasa situasi politik di DPD lebih harmonis. Berbeda misalnya dengan DPR yang terbelah dalam dua kubu.

Langkah yang diambil pemerintah ini sangat realistik, menunggu KMP dan KIH berdamai secara sungguh-sungguh. Sementara proses perdamaian berjalan, pemerintah menghadiri undangan Raker maupun RDP dengan DPD.

Di DPD sendiri, kata Arie, sebetulnya ada irisan-irisan partai politik. Dimana sebagian anggota senat merupakan anggota partai politik dari KMP dan KIH. Akan tetapi, irisan-irisan partai ini tidak berpengaruh besar pada kelembagaan DPD dalam mengambil keputusan.

"DPD tidak ada campur tangan politik tertentu meski ada irisan partai," jelasnya kepada Aktual, Kamis (11/12) pekan lalu.

Kondisi demikian, menurutnya akan terus berlanjut karena tidak ada kepastian dari pimpinan masing-masing partai politik dan perwakilannya di DPR. Semuanya

hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri.

Ia lantas menyenggung pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Pertemuan yang disebutnya untuk kepentingan sesaat, diterimanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada oleh kubu Koalisi Indonesia Hebat.

Begitu halnya dengan pertemuan lanjutan antara Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Semuanya demi kepentingan sesaat. Nanti kalau ada kepentingan lagi, (pimpinan parpol) muter lagi. Manuver-manuver politik ini tidak ada yang bisa dipegang satu sama lain," jelas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM ini.

"Situasi ini akan berlangsung lama, DPR enggak bisa menjalankan fungsinya, dan ini mempersulit pemerintahan juga. Ini sangat buruk," sambungnya.

Masih kata Arie, KMP dan KIH harus duduk bareng menyelesaikan masalah secara utuh. Keduanya harus bisa menjauhkan ego kelompoknya masing-masing. Karena bila berlanjut yang rugi adalah semuanya. Harus ada sikap kenegarawaran kedua belah pihak demi kepentingan bangsa yang lebih besar. ■

Jumly Sebut Perppu Pilkada Produk SBY Tak Efisien



Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan agak sulit melaksanakan pilkada pada 2015 nanti. Alasannya, tahapan pilkada diprediksi akan molor pada 2016 mendatang.

“Idealnya memang 2015, apabila begini harus kerja dua kali,” ucap Jimly, di kantor DKPP, Jakarta, Selasa (23/12) malam.

Menurut Jimly, daripada dimundurkan pada 2016, lebih baik jadwal pilkada dipadatkan sehingga bisa selesai 2015. “Yang penting

semua pihak sepakat,” ucap dia.

Lebih lanjut, sambung dia, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada oleh presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menyebabkan persiapan pelaksanaan jadi tergesa-gesa. “Perppu ini tak efisien, bikin makin panjang dan bertele-tele,” ujarnya.

Untuk diketahui, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Apabila perppu disahkan Januari-Februari, pemungutan suara harus berlangsung November-Desember. KPU telah menetapkan dua tanggal, yakni 18 November 2015 atau 16 Desember 2015, sehingga tahap kedua dan pelantikannya dipastikan molor hingga 2016. Hal ini membuat pemerintah dan KPU memilih pilkada serentak diundur. */Sukardjito*

Rakyat Menjerit, Usai Reses DPR Ajukan Interpelasi Kenaikan BBM

Hak interpelasi akan tetap dilakukan DPR. Pemerintah harus menjelaskan kebijakan, peruntukan pemotongan subsidi, penggunaan subsidi, berikut alasan yang kuat menaikkan BBM sebesar Rp 2.000, angka yang dinilai diluar batas kewajaran.

“Kami berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan kawan-kawan DPR,” kata Ketua Komisi VI DPR Hafizz Thohir kepada Aktual, Selasa pekan lalu.

Seluruh anggota, menurutnya tengah mengumpulkan fakta-fakta dilapangan sejalan dengan masa reses hingga awal Januari 2015 mendatang. Yakni untuk melihat langsung respon



masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.

Khusus Komisi VI, mendapat banyak gabungan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

Jokowi ‘Kudeta’ Megawati Jadi Ketum PDIP

Dukungan terhadap Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum PDI Perjuangan jauh mengungguli Megawati Soekarnoputri. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Presiden itu juga mengungguli Puan Maharani, putri Megawati.

Survei Cyrus Network pada 1-7 Desember di 33 propinsi menunjukkan, Jokowi mendapatkan dukungan 26 persen, Puan Maharani 18 persen dan Megawati 16 persen.

Survei tersebut mengejutkan sejumlah pimpinan partai berlambang banteng moncong putih. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut survei terhadap 1.220 responden di 122 desa itu terlalu menganda-ada.

Sementara Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah meyakini jika Jokowi tidak akan melakukan ‘kudeta’ politik terhadap Megawati. Alasannya sederhana, Jokowi mlarang menteri di kabinetnya rangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik.

“Logikanya sederhana, kalau menteri yang tugasnya *ad hoc* dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia *double standar*,” kata Basarah. */Soemitro*

Rakyat miskin tidak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup atas akibat subsidi BBM naik 2000 rupiah/liter.

Akibat yang terjadi dilapangan tidak sebanding dengan keuntungan arus fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.

“Dapat dikatakan bahwa pemerintah mendapat perolehan fiskal ± 100 triliun dengan cara ‘mencabut’ sedikit kemewahan (2000/liter) dari pundak rakyat miskin,” demikian Hafidz. */Soemitro*

Uchok : Banyak Kepentingan di Sekeliling Jokowi

Pengamat Politik Anggaran Ucok Khadafi menilai Presiden Joko Widodo tersandera utang budi terhadap sejumlah pengusaha besar sehingga kebijakannya tak bisa murni untuk rakyat.

“Kalau mau jujur, sangat banyak kepentingan disekeliling presiden Jokowi. Dia juga tak bisa berbuat banyak menghadapi orang-orang yang selama ini mendukung dia saat pilpres. Efeknya sangat terasa dari kebijakan yang sudah diambil,” katanya.

Ia mencontohkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa memperhatikan secara cermat bagaimana dampaknya bagi rakyat. Angka kemiskinan pasti sudah bertambah karena masyarakat yang tadinya masuk kategori kelas menengah sudah jatuh miskin akibat kenaikan BBM ini.

“Orang yang tadinya bergaji misalnya Rp3 juta sebulan, sekarang mungkin akan kehabisan duit di tengah bulan karena harga-harga semua naik. Lalu bagaimana yang gajinya Rp2,5 juta atau di bawah itu?



Mereka tak tersentuh kartu-kartu sakti segala macam itu,” tukas Uchok.

Presiden Jokowi, lanjutnya, juga mengkhianati visi dan misi pendirian negara, bahwa semua kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara adalah pelindung bagi rakyat.

“Tapi nyatanya sekarang negara bukan pelindung rakyat karena rakyat dibiarkan sendiri menghadapi arus deras konsumerisme, kapitalisme, bahkan negara ikut main-main didalamnya. Harga BBM saja sudah dilepas memakai mekanisme pasar, bagaimana yang lain-lain. Padahal ini butuh intervensi negara di dalamnya,” tuntas Uchok. / Soemitra

Bikin Kajian Migas, KPK Fokus Bongkar Potensi Korupsi Hulu Sampai Hilir

Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memprioritaskan kajian mengenai tata kelola di sektor Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut merujuk kepada sektor migas yang sangat rawan di korupsi.

“Kajian dari hulu sampai hilir, terkait pengelolaan migas. Itu yang akan diprioritaskan,” kata Deputi Bidang Pencegan KPK Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi, Rabu (24/12).

Johan mengatakan, perputaran uang disektor migas yang mencapai triliunan itu patut dipantau. Mengingat potensi korupsi di sektor migas sangat rawan.

Nantinya, sambung Johan, pihaknya akan menyinergikan kajian itu dengan tim refomasi tata kelola migas bentukan Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan, agar Faisal Basri cs, tahu dimana saja potensi korupsi yang terjadi di sektor migas ini.

“Mungkin nanti bisa disinergikan dengan tim migas itu (satgas),” kata Johan. / Wisnu Yusep



Sri Adiningsih: Siapa Yang Memakai Dana Pembiayaan AIIB

Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih mengingatkan agar kerjasama Indonesia dengan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) dikaji secara mendalam. Jangan sampai kerjasama itu hanya memberatkan APBN sedangkan pemanfaatannya tidak maksimal.

“Kalau bicara kerjasama pembiayaan untuk infrastruktur sih boleh-boleh saja. Tapi kaji dulu,

apakah benar Indonesia mendapat banyak keuntungan? Pastikan dulu kontribusinya seperti apa jika kerjasama ini dijalankan,” katanya kepada Aktual pekan lalu.

Jika tidak ada kajian tentang untung dan rugi dalam kerjasama ini, Indonesia dikhawatirkan bisa semakin banyak menanggung beban. Kedepan, kas negara juga bisa tergerus karena semakin besar utang yang harus ditanggung.

Kajiannya harus sampai pada siapa yang nantinya akan memakai dan memanfaatkan dana dari kerjasama dengan AIIB itu.

“Hitung penyertaan modalnya seperti apa, lalu siapa yang memakai



dana pembiayaan itu? Memang benar kita butuh pembiayaan untuk infrastruktur, tapi tetap saja harus dilihat secara mendalam antara biaya yang didapat dan beban yang akan ditanggung,” tuntas Sri. / Soemitra

Ganti Rezim Ganti Buku

Kebijakan Anies Baswedan membatasi penerapan Kurikulum 2013 menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai sebagai kemunduran besar, bahkan bisa menghidupkan kembali calo pendidikan yang semestinya diberantas

Oleh: M. Sahlan

Gaya blusukan yang menjadi tren pemerintahan presiden Joko Widodo ternyata benar-benar diikuti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Bekas Rektor Universitas Paramadina ini rajin mendatangi sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Pada sebuah blusukan yang diliput media penghujung November 2014, Anies mengumumkan kebijakan menghebohkan, yakni menginstruksikan sekolah-sekolah kembali memakai kurikulum 2006 sekaligus membatasi penerapan kurikulum 2013.

Dia membeberkan berbagai kelemahan kurikulum 2013 sehingga harus dibekukan. Apalagi kurikulum yang dibuat awal tahun 2013 itu hanya diujicobakan pada 6.400 sekolah di Indonesia. "Kita harus kembali ke kurikulum 2006. Sebab kenyataannya kurikulum 2013 sulit diberlakukan," ujar Anies.

Dijelaskan, pada tahun pelajaran 2013/2014 Kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara bertahap di 6.221 sekolah yang tersebar di 295 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Terbagi atas 2.598 sekolah dasar, 1.437 sekolah menengah pertama, 1.165 sekolah menengah atas, dan 1.021 sekolah menengah kejuruan.

Dalam perjalannya, Anies mengaku mendapat banyak keluhan dan masalah terkait kurikulum 2013. Misalnya ada keluhan pada guru karena terlalu beratnya sistem penilaian untuk siswa. Kemudian ketersediaan buku Kurikulum 2013

sebagai bahan untuk mengajar yang belum terdistribusi dengan baik.

"Sekarang, kita akan kembali ke kurikulum 2006 dan ini hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang memang belum mengimplementasikan tahapan-tahapan penerapan kurikulum 2013" cetusnya.

Untuk mendalami masalah ini, Kemendikbud membentuk tim investigasi Kurikulum 2013 yang diketuai Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar. Tim ini beranggotakan enam orang dan bertugas menelisik isi kurikulum 2013 termasuk pembelanjaan anggaran. Dijelaskan, tim investigasi akan mengaudit implementasi kurikulum 2013 secara bertahap.

Kebijakan Anies yang berusaha mengorek sisi buruk kurikulum 2013 membuat M Nuh kebakaran jenggot. Bekas Mendikbud ini balik menyerang dan menilai kembali ke kurikulum 2006 adalah langkah mundur karena substansi kurikulum 2013 tidak ada masalah. Justru kurikulum 2006 yang secara substansi ada kekurangan dan secara teknis butuh persiapan untuk menerapkannya kembali.

"Banyak sekali *negative list* dari Kurikulum 2006. Dulu saya masih tutup-tutupi karena bagian dari pemerintah. Tapi adalah suatu



kemunduran besar jika Mendikbud sekarang mengembalikannya ke KTSP," ujarnya.

Bekas rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) ini menyontohkan, kurikulum 2006 tidak mengajarkan pelajaran sejarah di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan ini dibenahi melalui kurikulum 2013 dengan menyempurnakan pelajaran tersebut bagi seluruh jenjang.

"Menanamkan sejarah ini penting untuk membangun jiwa nasionalisme siswa. Ini tidak ada di kurikulum 2006," ujarnya.

Kurikulum 2006 yang ingin diterapkan kembali itu, lanjut Nuh, juga lemah dalam pelajaran bahasa Indonesia karena pembelajarannya hanya dibatasi dua jam, sementara jam pelajaran bahasa Inggris empat jam di setiap sekolah. Hal ini dinilai lemah lantaran nilai rata-rata ujian nasional (UN) bahasa Indonesia pernah anjlok.

M Nuh tidak melihat keberhasilan



Rapat Kerja Kemenbuddikdasmen. Menbuddikdasmen Anies Baswedan (tengah) mengikuti rapat kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). Rapat tersebut membahas rencana kerja Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait dengan program Kartu Indonesia Pintar.

Tanggapan K13 Diganti KTSP. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan melakukan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013 di SDN Jombatan III sebagai sekolah pengembangan dan percontohan K13 Jombang, Jawa Timur, Senin (8/12).



kurikulum 2006 dalam meningkatkan kompetensi guru. Bukti, ketika uji kompetensi guru dilakukan pada tahun 2012 atau setelah enam tahun pemberlakuan kurikulum 2006, ternyata nilai rata-rata adalah 45. Di sisi lain, pihaknya juga pernah melakukan uji kompetensi guru untuk Kurikulum 2013 dengan nilai rata-rata mencapai 71.

Jika kembali ke kurikulum 2006, Nuh khawatir orang tua murid akan terbebani karena harus membeli buku, sementara buku untuk Kurikulum 2013 sudah disebar dan diberikan secara gratis. "Nanti, mafia buku akan merepotkan masyarakat lagi," cetusnya.

Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo juga mengkritik kebijakan Anies kembali ke kurikulum 2006. Ada potensi pemborosan anggaran serta diskriminasi pendidikan apabila kebijakan ini diterapkan. "Ini membingungkan sekali ya. Pemborosan pasti terjadi, paling tidak untuk cetak buku dan penyesuaian kurikulum lagi," kata Sulistiyo.

Selain itu keputusan Anies juga berpotensi pada pemborosan APBN pemerintah. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pemborosan tersebut bisa mencapai Rp2 triliun. "Kita kan nggak tahu aksi penghentian ini implikasinya berat. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Saya dengar mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya. Kalau ini masuk APBN kan hangus. Nah jangan ini sampai mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12).

Fahri manyarankan agar Anies bertemu dengan menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, M Nuh untuk membahas masalah kurikulum tersebut. "Kalau saya usulkan, sebaiknya menterinya juga ketemu mantan menterinya SBY. Jangan sampai kebijakan yang dibikin kabinet SBY jadi dimentahkan. Seperti kurikulum, ini kan sudah dibahas periode DPR lalu," katanya. ■



ISTANA RAKYAT TERLARANG UNTUK RAKYAT

Mengubah istana negara menjadi istana rakyat sempat didengungkan Joko Widodo (Jokowi) semasa awal terpilih menjadi Presiden. Testimoni seorang wartawan istana menyebut Istana Negara justru saat ini terlarang bagi rakyat.

Oleh: M. Sahlan

Sebuah taksi melaju pelan dari kawasan Tanah Abang menuju Istana Negara di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta pada Sabtu, 30 November 2014. Harapan dan keceriaan memenuhi suasana dalam sedan taksi yang mengangkut keluarga kecil beranggotakan enam orang.

Hari itu menjadi momen keluarga kecil dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu bertamasya di jantung Ibu Kota Jakarta. Kebetulan, satu keluarga mereka tinggal di Jakarta dan berprofesi sebagai wartawan yang biasa meliput di Istana. Wartawan itu bernama Fredrick Batari.

Sebagai wartawan, Fredy – Sapaan Akrab Fredrick – memahami bahwa istana dan Tugu Monumen Nasional (Monas) adalah kawasan strategis untuk berlibur. Dia pun tahu setiap hari Sabtu dan Minggu, istana negara boleh dikunjungi masyarakat sebagai bagian dari obyek wisata. Biasanya, liburan ke Tugu Monas dijadikan satu paket dengan kunjungan Istana Negara, mengelilingi kawasan Setneg, melaju ke Gedung Bina Graha di dalam Istana Negara.

Fredy menutur, kedatangan keluarganya dari NTT sudah dinanti

sejak lama. Dia pun ingin mengajak mereka pelesir ke jantung Ibu Kota Jakarta, termasuk ke Istana Negara. "Liburan ini sudah saya rencanakan jauh hari. Saya ingin mertua, keluarga, dan anak-anak senang. Dalam istana negara kan ada museum, putar video sejarah, baru keliling," tutur Fredy pertengahan Desember 2014.

Alangkah kaget Fredy, taksi yang dia tumpangi bersama keluarga tertahan aparat sebelum masuk ke dalam istana negara. Petugas yang berpakaian militer lengkap dengan tentengen senjata menyetop mobil itu tepat di pintu masuk.

"Saya ditanya mau ke mana? Saya bilang saja mau liburan keliling istana. Tapi langsung dilarang karena Presiden Jokowi sudah tinggal di Istana dan paket seperti wisata istana sudah dilarang," Fredy mengisahkan.

Buyar sudah rencana Fredy mengajak anak, istri, dan mertua bertamasya ke Istana Negara. Dia pun mengalihkan tujuan liburan ke Bogor menggunakan kereta *commuter line*. Melalui pengalaman ini, Fredy mengaku 'tertipu' dengan istilah istana rakyat yang didengungkan Jokowi. Akses istana semakin sulit dijangkau masyarakat. "Katanya istana rakyat, tapi nyatanya sekarang jauh dari rakyat. Akses rakyat yang



semula masih dibuka sekarang sudah ditutup sama sekali," tandas Fredy.

Kekesalan Fredi ini cukup beralasan. Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi kerap menyebut istilah Istana Negara sebagai Istana Rakyat. Untuk menegaskan istilah itu, Jokowi juga menggelar pesta rakyat di sepanjang jalan jendral sudirman-thamrin-menuju istana kepresidenan usai dilantik di MPR.

Sekarang ada fakta kontradiktif seperti tuturan pengalaman Fredrick Batari, wartawan yang lama meliput di Istana kepresidenan. Dia menuturkan, sejak Jokowi menjadi presiden, ada akses yang hilang bagi rakyat untuk masuk ke Istana. Fredy mengaku kini merasakan sulit masuk istana dengan berbagai alasan. "Makanya, perlu digugat lagi istilah istana negara sebagai istana rakyat," tuntas Fredy.

Sekelumit kisah di sisi istana ini juga menjadi awal perubahan pola kerja dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Setelah dilantik tanggal 20 Oktober sepekan kemudian Presiden langsung membentuk Kabinet Kerja. Sebanyak 34 Menteri membantu Presiden yang terdiri dari golongan professional dan usulan partai pendukung.

Dua hari setelah melantik para pembantunya Presiden langsung mulai kerja. Bersama rombongan kabinet, ia terbang ke Medan. Menggunakan pesawat kepresidenan Jokowi mengunjungi korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Di situ untuk pertama kalinya Presiden memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat. Didampingi ibu Negara saat itu 500 lempeng KIS dibagikan kepada para pengungsi. "Ini buat kalau sakit tinggal pakai kartu Indonesia sehat, tapi semoga nggak pada sakit," ujarnya.

Kartu-kartu itu dibagikan presiden sebelum resmi diluncurkan sepekan kemudian. Syahdan tanggal 3 November di kantor Pos Pusat, Jakarta, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan dan sejumlah menteri lain ikut dalam meluncurkan dua kartu yang menjadi program andalan pemerintah baru ini.

Secara simbolis, KIS itu dibagikan untuk ratusan masyarakat penerima. Program KIS ini akan difokuskan di 19 provinsi atau kabupaten/kota yang disentuh secara bertahap seperti DKI Jakarta, Mamuju Utara, Jembrana, Pematang Siantar, Kota Kupang, Kota Semarang, dan Kota Balikpapan.

Ketika KIS diluncurkan Presiden, kondisi politik saat itu masih panas. Perselisihan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) terkesan mencapai titik didih. Kesan yang tercipta akibat tak

Kartu Sakti. Presiden Jokowi beserta isteri didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Pusat Pasar Baru, Jakarta (03/11).

Warga menunjukkan kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Pusat Pasar Baru, Jakarta (03/11).





ada satupun menteri yang datang ke DPR untuk membicarakan program andalan pemerintah ini. Mulai dari mekanisme sampai penganggarannya semua dilakukan serba cepat oleh pemerintah.

Sekretaris TNP2TK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Bambang Widianto menjelaskan pendanaan program ini menggunakan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang tahun ini dialokasikan sekitar Rp 20 triliun.

Sebaliknya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut anggaran program kedua kartu ini berasal dari dana Bantuan Sosial sebesar Rp 6,4 triliun.

Lain lagi Menteri Sekretaris

Negara Pratikno yang memiliki versi tersendiri dengan anggaran itu. "Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari berbagai pihak," ujarnya.

Saat dijumpai di Hotel Grand Clarion, Makassar, usai mendampingi Presiden blusukan, Rabu malam (5/11/2014), Pratikno menjelaskan: "Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN."

Dia bahkan meminta DPR tidak meributkan asal anggaran yang digunakan pemerintah untuk kartu sakti ini. "Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita fokus ini saja dulu. Selama ini banyak anggaran, tapi tidak fokus, maka kita fokuskan," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu.

Namun Wakil Presiden Jusuf

Kalla akhirnya mengamini anggaran untuk kartu-kartu tersebut memang berasal dari BPJS dan senilai Rp 19 triliun. Inilah awal permasalahan di antara DPR dengan pemerintah.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai seharusnya pemerintah melaporkan penggunaan dana BPJS itu kepada DPR. Karena, sebelum melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintahan Jokowi-JK harus memiliki landasan hukum berupa aturan perundang-undangan yang merupakan ranah lembaga legislatif.

"Kalau mau membuat undang-undang tentang KIS, harus mendapat persetujuan DPR. Tinggal bagaimana nanti, apakah Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU

BPJS) dicabut dulu, lalu membuat UU baru atau bagaimana," kata Dede.

Saat ini, jelas Dede, sudah ada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatur Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Selama dua undang-undang itu belum dicabut atau direvisi, maka KIS diasumsikan sebagai produk dari BPJS dengan penyempurnaan. "Semua program pemerintah harus ada 'cantelan' hukumnya yang disepakati bersama DPR. Saat ini sudah ada Undang-Undang BPJS, maka itu yang kita terima," kata politisi Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan menyebut anggaran yang dipakai untuk KIS itu haram. "Program harus punya nomenklatur. Kalau tidak ada dalam undang-undang (APBN), haram uangnya dikeluarkan," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11).

Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan menilai program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagai dua program yang tidak beretika. Padahal dua program itu tak berbeda jauh dengan program sebelumnya, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"KIP apa bedanya dengan BSM? Target dan sasarnya sama, anggarannya sama. Bahkan nama anggaran di dalam APBN pun masih pakai nama BSM," kata Nuh saat ditemui di Universitas Raden Rahmat, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis 6 November 2014.

Tentang hal besaran bantuan, Nuh menyebut angka KIP dengan BSM yang dia laksanakan semasanya tidak ada perbedaan. Contoh, bantuan Rp400 ribu untuk siswa SD, Rp700 ribu untuk SMP dan Rp1 juta untuk SMA per bulan.

Penerima bantuan pun sama dengan penerima BSM lalu.

Dia menilai, akan lebih baik jika peraturan yang lama tetap dilanjutkan hingga selesai tahun anggarannya, baru nanti diganti dengan program baru dengan anggaran baru. "Dari sisi tata krama saja, kalau kaos sampeyan, ya kan tidak boleh saya kasih nama saya," ujarnya.

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pun menanggapi kritik sejumlah kalangan tersebut. Khususnya terkait landasan hukum pelaksana kartu sakti itu. Ia menyebut Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden sebagai payung hukum. Inpres Nomor 7 Tahun 2014 ini telah ditandatangi Jokowi pada 3 November lalu.

Inpres yang diunggah oleh situs resmi Sekretariat Kabinet ini berisi ihwal pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Secara khusus, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan tiga program perlindungan sosial ini. Presiden juga meminta Puan menangani pengaduan masyarakat soal pelaksanaan KIS, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan melibatkan menteri terkait, kepala daerah, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

"Melaporkan kepada presiden atas pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian kata Presiden dalam Inpres tersebut.

Karuan pernyataan Puan ditukas oleh mantan Menteri Sekretaris Negara **Yusril Ihza Mahendra**. "Puan

katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres yang akan diteken Presiden Jokowi. Puan harus tahu, inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI," ujarnya



Inpres dan Keppres, menurut Yusril, memang pernah digunakan pada era Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Namun, setelah reformasi, keduanya tak digunakan lagi. Karena, Inpres hanya perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.

Ia juga menyarankan agar Mensesneg Pratikno berbicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti. Dia (mensesneg) katakan, imbuhan Yusril, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.

"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara," katanya.

Ia menyebut pemerintahan Jokowi menjalankan anggaran Negara layaknya warung. Ia juga meminta Puan untuk belajar betul bagaimana mengelola Negara dengan baik.

"Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan," Yusril mengingatkan.

Sejak polemik tentang anggaran kartu sakti tersebut Puan memilih banyak diam. Dalam kegiatan kementerian, Puan hampir selalu didampingi Sekretaris Kemenko PMK Sugihartatmo dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP. Gaya Puan memimpin ini, tentu agak berbeda dengan Menkokesra sebelumnya Agung Laksono yang lebih aktif bertemu dan menjelaskan berbagai urusan kementerian.

Sikap tidak banyak komentar ala Puan ini, membuat para wartawan yang meliput di Kemenko PMK sulit mendapatkan berita-berita menarik untuk dipublikasikan.

"Kita dapat beritanya dari menteri-menteri atau pimpinan lembaga terkait yang ke sini melakukan koordinasi. Makanya isu pasti ada saja yang dikembangkan walaupun tidak langsung komentar ibu menteri," tutur seorang jurnalis senior yang lama meliput di kementerian tersebut.

Gaya tak banyak komentar Puan ini. mengingatkan khalayak pada sosok Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI ke-5. Kala itu, Mega memakai politik diam sebagai senjata untuk menghindari konflik. Ini bertolak belakang dengan gaya Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sangat sering mengeluarkan statemen, termasuk menyampaikan inisial-uinisial menteri terancam reshuffle.

Selera Penampilan Puan yang Klasik

Komentar Puan terkait kinerja kementeriannya memang jarang dipublikasi media. Namun soal gaya hidup, dia disebut-sebut memiliki selera yang tinggi. Cara berpakaian dan merias wajah juga cukup rapih. Malah dia diketahui kenal dekat dan merupakan langganan desainer kawakan bernama Amy Atmanto dan banyak koleksi pakaian Puan merupakan desain dari Amy.

Namun, cucu proklamator kemerdekaan RI Soekarno ini tetap saja dicitrakan sebagai sosok yang orang biasa yang tidak suka dengan barang-barang mewah.

"Soal penampilan sih semua juga sama. Tapi setau saya Mbak Puan bukan tipe orang yang suka mengoleksi barang-barang barang mahal. Dia malah orangnya simpel dan suka dengan

selera yang klasik tapi elegan," tukas Amy Atmanto.

"Lihat saja, kalau berpenampilan kan tidak ada banyak perhiasan yang dikenakan. Paling hanya pakai satu cincin seperti cincin kawin atau anting saja. Udah," imbuhnya.

Penunjukan Puan sebagai Menko PMK sebenarnya banyak menuai kritik. Malah sempat ada yang menyebut Puan dipilih Jokowi karena tidak enak dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Ada juga yang menilai Puan belum cakap pantas menjabat sebagai Menteri Koordinator.

Tentu saja spekulasi ini ditepis Puan.

"Ini bukan masalah *ewuh pakewuh*. Kan hak prerogatif Presiden memilih menteri dan pasti presiden punya pertimbangan matang," ujar Puan dalam sebuah acara televisi beberapa pekan setelah pelantikannya menjadi menteri.

Munculnya pendapat miring tentang dipilihnya Puan sebagai menteri tentu tidak datang begitu saja. Jika menteri-menteri lain harus dipanggil Jokowi sebelum dipilih, maka Puan adalah satu-satunya menteri yang tidak dipanggil Jokowi untuk seleksi.

"Interaksi saya dengan beliau (Jokowi) bukan baru sekarang. Kami sudah lama berkomunikasi dan sudah sama-sama paham mengenai sifat, kekurangan, dan kelebihan," tukas Puan.





MENTERI RINI DENGAN PENDINGIN DAN CALON BOS ASING

Oleh: Soemitro



Efisiensi terlihat menjadi pilihan utama menteri Kabinet Kerja dalam berebut sempitnya ruang pemberitaan media. Jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Crisnandi membuat surat edaran hidup sederhana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), beda lagi dengan cara Menteri Badan Usaha Untuk Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla ini mencuri perhatian media dengan mewacanakan ide menjual Gedung Kementerian BUMN alias kantornya sendiri. Alasan Rini menjual gedung di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta ini sepele. Yakni lantaran karyawan terlalu sedikit untuk menempati gedung setinggi 21 lantai itu. Alasan lain Rini, karena sistem pendingin yang tersentral membuat pemborosan beban listrik.

“Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup sehingga ya dijual saja kalau gitu,” ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Ketika para deputi harus masuk kerja pada Sabtu dan Minggu, kata Rini, atas dalih menghemat penggunaan listrik ternyata AC gedung tak boleh dihidupkan. “Mereka curhat kalau kerja kepanasan dan sampai keringatan karena AC-nya mati. Kalau mau dihidupin, (AC di) semua gedung harus hidup, kan mubazir,” kata dia.

Ia juga langsung memberikan dua calon pembeli potensial yakni Pemprov DKI Jakarta atau Bank Indonesia. “Tolong tawarkan ke Pak Ahok, saya ingin menawarkan ke Pak Ahok,” ujarnya.

Dikonfirmasi di kantornya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung menyambut ide penjualan tersebut. Ia sepakat membeli jika harganya pantas. “Mau



(beli). Dipakai untuk macam-macam misalnya bikin mall rakyat juga boleh, PKL bikin kafe-kafe juga boleh,” kata Gubernur ini bergurau di Balai Kota DKI Jakarta.

Ide Rini langsung menuai kritik pedas dari Senayan. Wakil Ketua Komisi V **Dody Reza Alex Noerdin** menilai Rini tidak visioner.

“Pemikirannya seharusnya lebih visioner, kalau sekadar jual aset BUMN, mulai jual kantor, kurang kreatif,” kata Dodi, saat dihubungi, Selasa (16/12/2014).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, jika alasannya untuk efisiensi anggaran, seharusnya Rini membuat kebijakan menggabung beberapa BUMN dalam satu gedung.

Penjualan aset negara, kata Dodi, hanya dapat dilakukan dengan kajian mendalam saat tak ada pilihan lain. “Harusnya Bu Rini mikirin BUMN yang mau kolaps, lahan terlantar, urusi itu saja. Jual gedung bukan urusan menteri BUMN,” ujarnya.

Selain ingin jual gedung satu lagi ide Rini yang ramai dibicarakan. Yakni terkait dengan wacana membuka pintu bagi warga Negara asing menjadi Direktur BUMN. “Global CEO perusahaan BUMN orang asing bisa saja,” ujar Rini.

Ide ini dilandasi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. Namun ia menyatakan tetap akan memprioritaskan anak bangsa sebagai pimpinan BUMN. Saat ini pihaknya tengah menyewa tim khusus untuk memburu calon Direktur BUMN yang mumpuni tentu dengan gaji tinggi.

“Trading kita masih lemah. Oleh karena itu, kami menggunakan *head hunter* untuk mencari calon direktur yang punya kapasitas dan kemampuan global,” kata dia.

Keinginan Rini tersebut langsung diamini oleh Menteri Koordinator

Perekonomian Sofjan Djalil. “Karena kita memerlukan ekspatriat di BUMN, boleh (orang asing jadi direkti BUMN),” ujar Sofjan di kantor Kementerian Perekonomian, Selasa (16/12).

Sofjan menambahkan calon direkti yang berwarga negara asing harus mempunyai keahlian khusus. Yaitu keahlian yang belum dimiliki oleh profesional di dalam negeri. “Kita harus mempercepat SDM-nya. Profesional di Indonesia ini masih suatu yang langka,” kata Sofjan.

Namun Ketua Komisi VI DPR **Hafizz Tohir**, berbeda pendapat. Ia menilai rencana itu menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. “Bila ada orang asing yang menjadi Direksi BUMN, itu sama artinya menjual Indonesia kepada asing,” kata dia dalam dalam pesan singkat kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Selasa (16/12).

Dia juga menilai hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia makin kehilangan roh perjuangan 45 dan tidak lagi hidup berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. “Saya sangat menyesalkan keinginan Menteri BUMN, Rini Soemarno agar orang asing bisa menjadi Direksi BUMN,” kata Hafizz.

Wakil rakyat dari Fraksi PAN ini pun mengungkapkan sewaktu Rini menjabat Direktur Utama PT Astra Motor, Indonesia, dia tak mampu memproduksi mobil nasional. “Indonesia tidak kesampaian membuat mobil nasional karena Jepang masuk dan menghalangi secara industri melalui kepanjangan tangan Toyota Jepang di Astra Indonesia,” kata politisi PAN itu.

Rencana Menteri Rini ini tentu bertentangan dengan pesan proklamator Indonesia Bung Hatta. “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing,” ujar Hatta. Juga tidak sejalan dengan revolusi mental tentunya. ■



EKTP Palsu. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur DI. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menunjukkan dua buah EKTP palsu disela acara rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2014).



MENDAGRI TJAHO KUMOLO

MENGGEBAK DI LUAR MERIANG DI DALAM

Oleh: Moh Sahlan

Euforia pelantikan sebagai anggota kabinet masih terasa ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan keinginannya mengumpulkan seluruh gubernur untuk rapat di Jakarta, November 2014. Mantan Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengobarkan semangat bersih-bersih

di lingkungan kementerian.

Tjahjo memang langsung unjuk gigi dan ceplas-ceplos mengomentari berbagai masalah. Seperti mengkritik program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dia sebut amburadul dan server e-KTP ada di luar negeri. Dia juga menginstruksikan pelayanan pengurusan e-KTP dihentikan sementara hingga Januari 2015

untuk dilakukan proses evaluasi dan perbaikan sistem.

Pernyataan Tjahjo ini sotak membuat gerah sejumlah pejabat di lingkungan kementerian, meski tak ada yang berani mengeluh secara terbuka. Kegerahan para pejabat ini diendus wartawan yang meliput di sana. Bahkan ada seorang pejabat yang ingin mundur akibat gerah dengan *statement* Tjahjo di luar.

“Sampai ada pejabat minta mundur gara-gara statemen pak menteri soal server e-KTP,” tutur seorang wartawan koran yang sehari-hari meliput di Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan masalah e-KTP sudah *clear* dan isu ini pun tak perlu disebut-sebut lagi. Namun dia mengakui pada awal-awal menjabat



menteri memang butuh waktu memahami secara utuh masalah-masalah di Kementerian.

“Itu kan isu lama. Soal server e-KTP itu sudah dijelaskan sama pak DIrjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekarang beliau (Mendagri) sudah mendapat gambaran utuh soal ini,” ujar Dodi.

Gaya memimpin Tjahjo memang sangat kental dengan gaya politik. Tak heran jika dia butuh waktu beradaptasi dengan sistem birokrasi yang lebih terstruktur rapi. Tak heran pula jika Tjahjo dengan mudah menjadi sasaran empuk para anggota DPR, khususnya dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi oposisi pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, termasuk yang paling senang merespons kesalahan Mendagri. “Mendagri lebih baik mengurangi blusukan ke luar. Pak Tjahjo blusukan di rumah sendiri dulu baru keluar. Wong server e-KTP ada di kantor sendiri kok dibilang di luar,” ujar Fadli.

Politikus Partai Gerindra ini bukan kali ini saja menegur Tjahjo. Sebelumnya, dia menyoroti kesalahan Mendagri saat melantik Basuki Tjahja

Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta wacana penghapusan kolom agama dalam KTP.

“Mendagri sudah dua kali melakukan blunder. Pertama, memaksakan pelantikan Ahok jadi Gubernur yang dinilai melanggar UU. Kedua, pengosongan kolom agama,” ujar Fadli.

Terkait pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, saat ini DPRD DKI Jakarta tengah meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu dijadikan dasar pengangkatan Ahok untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Jokowi. Adapun soal kolom agama dalam KTP, Fadli menyebut ide ini sangat dangkal dan tidak memiliki urgensi.

“Tidak ada kebutuhan mendesak yang memaksa Mendagri harus membuat aturan baru dalam pencantuman agama di KTP. Apa urgensinya pengosongan kolom agama? Kecuali mau memperbanyak atheisme atau aliran-aliran,” tukas Tjahjo.

Jarang Ngantor

Seorang staf di Kemendagri menuturkan, sejak pergantian

Mendagri dari Gamawan Fauzi ke Tjahjo Kumolo dirasa terjadi banyak perubahan. Jika sebelumnya Mendagri mudah ditemui di kantor Kemendagri di Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, maka saat ini jangan harap bisa bertemu Tjahjo setiap saat.

“Pak menteri (Tjahjo) sekarang memang jarang-jarang ke kantor. Kalau datang paling cuma sejam atau setengah jam habis itu pergi lagi,” ucapnya.

Setiap datang dan pergi, lanjut Kusni, mendagri juga tidak membawa tim pengawalan seperti menteri sebelumnya. “Saya lihat sih enggak pakai patwal. Pak Menteri datang dan pergi saja pakai ajudan, kayaknya bawaan sendiri. Enggak dikawal dan pakai mobil bawaan sendiri kayaknya,” tutur Khusni.

Wartawan yang meliput di Kemendagri juga mengakui betapa sulitnya menemui menteri untuk minta komentar. Jika sebelumnya awak media bisa mencegat mendagri di bawah pintu keluar, kali ini sangat jarang hal itu bisa dilakukan. Wartawan saat ini lebih banyak mewawancara Kapuspen Dodi Riatmadji lantaran sulit mendapat komentar langsung dari Tjahjo. ■

Menteri Hukum dan Ham Yasona H Laoly langsung meluncur ke kantor barunya usai dilantik Presiden Joko Widodo, Senin (27/10). Kantor Yasona yang bertempat di kawasan Jalan Rasuna Said tersebut sejumlah kudapan sudah disajikan tuan rumah. Di salah satu ruangan, yakni Graha Pengayoman, siang itu akan berlangsung prosesi serah terima jabatan dari Amir Syamsuddin kepada Yasona.

Keduanya terlihat saling berbincang. Tampak juga disertai gurau dari dua Menkumham periode sebelumnya yakni Andi Mattalatta dan Patrialis Akbar. Bahkan saat memberi sambutan, Amir sempat melempar pantun. "Yang wangi batang si daun pandan, yang rimbun pohon rambutan. Yang telah dicapai mohon ditingkatkan, yang belum mohon dilanjutkan," kata Amir menyebut bait-bait pantunnya.

Tak cukup di situ, Amir juga menyampaikan pantun kedua yang diperuntukan kepada jajaran staf dan pegawai Kemkumham. "Rambutan tiga dekat kuini, tingkap belah toleng rapatkan, sambutan saya sampai di sini, silaf dan salah mohon maafkan," katanya.

Menkumham Yasona Laoly yang merupakan salah satu menteri dari PDI Perjuangan tak mau kalah berpantun. Seusai menyampaikan sambutannya selaku Menkumham ke-34, dia juga mengemas ungkapan selamat jalan kepada Amir dengan berpantun. "Burung irian burung cenderawasih, terbang tinggi jauh sekali, cukup sekian dan terimakasih, mudah-mudahan kita bertemu kembali," kata Laoly.

Usai pesta perpisahan digelar. Laoly langsung tancap gas. Setumpuk pekerjaan yang ditinggalkan Amir Syamsuddin langsung digarap. Surat dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuziy, tentang perubahan struktur partai, langsung disambarnya. Surat itu sebenarnya sudah sampai ke



CEPAT-CEPAT ASAL SELAMAT

Oleh: Dedy Kusnaedi

kantor Kumham tanggal 17 Oktober usai Romy disahkan sebagai Ketua Umum. Namun oleh Amir sengaja tak disentuh, agar diputuskan oleh pengantinya.

Kurang dari 24 jam setelah serah terima jabatan, Loly langsung mengesahkan perubahan struktur

partai berlambang Ka'bah kubu Romi. Setelah membubuhkan tandatangan dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-07. AH.11.01 tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan, Laoly langsung

mengabarkan keputusan itu kepada presiden.

“Saya mengesahkan itu bukan atas petunjuk presiden. Jika ada yang tidak sepakat, saya siap digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya siap mengambil tanggung jawab atas keputusan itu,” kata Yasonna di Jakarta, Rabu petang (29/10).

Torehan awal Laoly di Kemenkumham langsung disorot. Suryadarma Ali kubu yang berseberangan dengan Romi pun melayangkan gugatan kepada menkumham. Gugatan ini didasari sejumlah fakta hukum bahwa Menkumham melanggar Undang-undang Parpol, yang menyatakan penyelesaikan perselisihan parpol harus ditempuh melalui Mahkamah Partai PPP.

“Sikap Menkumham yang tidak cermat, tidak konsisten dan mengenyampingkan hukum telah melanggar asas profesionalitas dan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas dari pemerintahan yang baik,” ujar Ketua tim kuasa hukum PPP Humphrey Djemat, esok harinya.

Keputusan kilat Laoly tidak lepas dari situasi politik perseteruan dua kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pengamat ilmu hukum tata negara Universitas Indonesia, Refly Harun menilai Laoly berpihak pada kubu Romi yang ingin bergabung ke KIH koalisi pimpinan PDI-Perjuangan. Hingga kini gugatan kubu SDA masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebulan kemudian, pada 28 November, Laoly jadi perbincangan kembali. Jumat itu Pollicarpus Budihari Priyanto terpidana kasus pembunuhan aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib ke luar penjara dengan status bebas bersyarat. Pembebasan mantan pilot Garuda Indonesia ini tamparan bagi komitmen pemerintahan Jokowi yang berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM.

Laoly mengatakan pembebasan Polly tak pernah dikonsultasikan

padanya. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat habis didamprat sang Menteri. “Seharusnya kepala kanwil, kepala lapas lapor saya dong. Jadi sensitivitasnya itu enggak ada, makanya kemarin saya marahin,” ujar Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Polly divonis 14 tahun penjara atas kasus pembunuhan Munir. Namun baru 8 tahun menjalani penjara, dia sudah menghirup udara kebebasan. Meski ia masih wajib lapor sekali sebulan ke Balai Pemasyarakatan Bandung. Keputusan pembebasan ini karuan membuat aktivis sahabat Munir geram. Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bahkan mengirim somasi kepada Presiden dan Menkumham.

“Surat akan kami berikan besok di aksi Kamisan, kepada Jokowi dan Kemenkumham, surat ini dimaknai tidak hanya pada upaya hukum tapi juga kritik teguran politik. Ini bukan soal pembebasan Poly, tapi bagaimana skema penyelesaian kasus HAM yang dimaknai kasus prioritas justru melepaskan Poly,” ujar Wakil Ketua Human Rights Working Group (HRWG), Chairul Anam.

Menggapi reaksi keras itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy menilai sikap mereka seperti tari poco-poco. “Kalau hanya mencari kesalahan-kesalahan kapan mau majunya. Kayak poco-poco toh kalau gitu. Maju mundur maju mundur. Nggak maju-maju nggak membangun,” ujarnya di kantor Presiden 4 Desember.

Tedjo meminta masyarakat tidak lagi mengungkit kasus terbunuhnya Munir. Peryataan Tedjo ini menurut Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menunjukkan pengetahuan dan komitmen pemerintahan Jokowi pada HAM rendah.

“Menkopolhukam ini selain tidak berpihak kepada penegakan HAM, sepertinya memang tidak mengerti HAM,” kritik Haris.

Munir meninggal tanggal 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Belanda. Kasus ini sempat menyeret nama pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) era kepemimpinan Hendropriyono. Bahkan Badan Reserse dan kriminal (Bareskrim) Polri sempat menetapkan mantan Deputi V Bidang Penggalangan BIN, Muchdi PR menjadi tersangka. Namun ia bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Surat Perdana Tedjo untuk Ical

Secarik surat dilayangkan Menko Polhukam Tedjo Edhi Pudijatno kepada media massa, Selasa (25/11). Isinya siaran pers yang melarang Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 30 November di Bali.

“Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali,” demikian siaran pers Humas Kemenko Polhukam.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) menilai ada potensi rusuh pada munas, yang beragenda memilih nakhoda partai politik tertua di Indonesia tersebut. Potensi rusuh yang menjadi dalih pelarangan Munas Golkar itu didasari oleh fakta terjadinya beberapa kericuhan internal Partai Golkar saat rapat persiapan munas di markas partai berlambang Pohon Beringin di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang berujung terbentuknya Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dibidani oleh Agung Laksono.

“Pada rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 WIB, terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014, sehingga

mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka," kata rilis ini.

Potensi rusuh ini, menurut Tedjo, bisa berdampak buruk terhadap iklim pariwisata di penghujung tahun 2014, sebagai puncak kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

Instruksi tersebut tak diindahkan, tanpa bergeming sedikitpun Partai Golkar tetap melangsungkan munas di Nusa Dua, Bali. Tentu saja dengan restu Polda Bali. Bahkan munas itu berhasil menyusun susunan kepengurusan baru Partai Golkar yang di komandoi Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2014-2019.

"Dalam Undang-undang tidak diperlukan izin bagi partai politik untuk Munas. Yang ada hanya pemberitahuan, apakah ditolak atau tidak pemberitahuan itu," kilah ARB di Jakarta, Selasa (25/11).

Kecaman pedas pun datang dari Parlemen, yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Menko Polhukam dan Polri, tak sepatutnya melarang digelarnya acara partai. Untuk itu, Komisi III DPR, berencana memanggil Tedjo dan Kapolri Jenderal Sutarman.

Tak pelak instruksi Tedjo, yang juga berasal dari Partai Nasdem, memicu spekulasi adanya pertarungan Kubu ARB dengan Surya Paloh, seperti pernah terjadi saat perebutan Ketua Umum Partai Golkar beberapa tahun lalu yang dimenangi oleh ARB, sehingga berujung terbentuknya Ormas Nasional Demokrat, bibit cikal bakal Partai Nasdem.

Instruksi Menteri Tedjo ini juga dikritisi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem. Ia menilai pemerintahan Jokowi mulai menghidupkan lagi tradisi politik Orde Baru untuk mendukung kekuasaan yang rapuh.

"Tidak dapat dibantah intervensi Menko Polhukam yang melarang Golkar menggelar munas di Bali sama dengan praktik politik Orde Baru," tegas mantan anggota DPR Fraksi PPP itu.

Namun Tedjo membantah dia melarang Munas Golkar kubu ARB. "Karena disana adalah kawasan wisata, jangan dirusak. Saya hanya mengingatkan apakah izinnya ada? Coba lihat, tidak ada kata larangan dalam surat," ujarnya.

Larangan Menteri Yudi

Lebih dari 500 undangan memenuhi Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, di Jakarta Selatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Crisnandi menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di tempat itu. Tampak Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Wali kota DIY, Bupati Bintan, dan Tanjung Pinang dan sejumlah kepala daerah lain. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga hadir.

Saat memberi sambutan, Yudi mengingatkan agar kepala daerah memperhatikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. "Dalam sidang kabinet kemarin Presiden mengatakan, daerah-daerah yang kinerja buruk, pelayanan kerjanya buruk yang tidak ada keinginan untuk memperbaiki, tidak memiliki leadership yang melayani rakyat, maka bantuan alokasi khusus tidak perlu dikeluarkan. Mereka bakal tidak masuk APBN," kata Yuddy, Senin (8/12).

Acara di Bali Kartini itu bertolak belakang dengan Surat Edaran yang ditandatangani Yudi sepekan sebelumnya. Ia melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hidup mewah. Salah satunya dengan melarang PNS menggelar acara di hotel berbintang maupun hall mewah. Surat Edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi para aparatur Negara itu mengatur, bagi pejabat negara/keluarga pejabat diminta membatasi jumlah undangan resepsi acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya, maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.

Pemerintah juga meminta agar



para penyelenggara negara tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepastasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

"Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah, dan membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi," tulis Yuddy dalam surat edaran yang dilansir laman Setkab.go.id, Kamis, 27 November 2014.

Namun Yudi punya alasan khusus soal penggunaan rungan mewah di Balai Kartini untuk acara Kementerianya tersebut. "Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di kantor Kementerian PANRB karena tidak ada satu pun ruangan instansi yang dapat menampung peserta yang mencapai 15.00 orang. Sebab selain bupati dan wali kota, hadir juga masing-masing Kepala SKPD dan staf kabupaten/kota," jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman.

Dijelaskannya, sesuai SE Menteri PANRB 11/2014, dalam melaksanakan pertemuan atau rapat, instansi agar menggunakan fasilitas sendiri atau milik instansi lain. Kecuali jumlah peserta rapat tidak bisa ditampung oleh fasilitas instansi

Kepada:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 69
Jakarta - 12190

Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,

Melalui surat ini saya Arief Syaiful, PNS Kementerian Sekretariat Negara, ingin menyampaikan kritik terkait Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Surat edaran tersebut menyatakan antara lain "Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih 1000 orang".

Kritik saya adalah pemerintah seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pribadi seseorang (misal pernikahan), terlebih urusan tersebut tidak menggunakan uang negara.

Saya bisa memahami surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka menggiatkan gerakan revolusi mental. Namun menurut saya, revolusi mental bukanlah semata upaya mengubah mentalitas individu tetapi juga termasuk mengubah mentalitas pemerintah yang masih mencampuri urusan pribadi/privat, di mana hal semacam ini seharusnya dihilangkan.

Kritik saya ini sama sekali tidak bermaksud untuk melawan atau membangkang, justru saya mengkritik sebagai wujud kepedulian saya agar paradigma pemerintah dalam pembangunan tetap memperhatikan batas-batas apa saja yang seharusnya tidak disentuh atau diintervensi, khususnya hak privasi yang harus dihormati.

Demikian, semoga kritik dari saya dapat memberikan kontribusi positif agar negara kita menuju ke arah yang lebih baik.

Terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2014

Arief Syaiful

Tembusan:
Presiden RI

atau instansi lainnya.

"Yang hadir pada acara kemarin mencapai 15.00 orang. Karena tidak ada fasilitas instansi yang dapat menampung, maka kami laksanakan di Balai Kartini," paparnya.

Herman menegaskan juga, Balai Kartini merupakan milik Yayasan Kartika Eka Paksi TNI AD. Pendapatannya dikontribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, bagi instansi pemerintah yang menggunakan Balai Kartini mendapatkan discount khusus. Karena itu harganya sangat kompetitif, di bawah Standar Belanja Masukan (SBM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Gerakan hidup hemat yang digagas Politisi Hanura ini juga

dijanjikan Presiden Joko Widodo.

"Revolusi mental bukan semata merubah mental individu, tetapi juga termasuk merubah mental pemerintah yang mencampuri urusan pribadi dimana hal tersebut sudah harus dihilangkan," ujarnya.

Protes juga dikatakan oleh Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kabupaten Semarang Sumardi mengatakan, terbitnya surat edaran larangan bagi instansi pemerintah untuk menggelar rapat atau kegiatan di hotel, dipastikan membuat lambat laun bisnis perhotelan akan terpuruk, karena selama ini kegiatan kedinasan instansi pemerintah di hotel menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan hotel.

Sebenarnya surat edaran

sempat ditentang PNS di kantor Sekretariat Negara. Arief Syaiful, PNS tersebut mengirimkan surat langsung ke Kementerian PANRB mengkritik kebijakan sang menteri. Menurutnya pembatasan undangan pernikahan yang dilakukan Negara telah masuk ke ranah privat. "pemerintah tidak perlu mengurus urusan pribadi terlebih urusan tersebut tidak menggunakan keuangan Negara," ujarnya seperti dikutip dalam surat tersebut.

Ia menyebut surat edaran tersebut justru menunjukkan lemahnya komitmen revolusi mental yang

dijanjikan Presiden Joko Widodo.

yang sudah diberlakukan pada 1 Desember 2014, bukan hal baru dan murni datang dari gagasan sang menteri. Di Jawa Tengah, pada era Gubernur Bibit Waluyo pernah dikeluarkan surat edaran yang berbunyi sama. Alhasil efek dari surat edaran tersebut, melesukan bisnis perhotelan, khususnya di Kabupaten Semarang.

Selain itu, Menteri Yuddy juga mengeluarkan Surat Edaran nomor 10/2014, yang berisikan aturan agar semua instansi pemerintahan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, seperti singkong.

"Surat Edaran itu untuk seluruh kementerian dan departemen. Kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, jadi mengutamakan makanan dalam negeri," kata Yuddy, di Jakarta, Kamis (27/11).

Yuddy berkeyakinan surat edaran tersebut akan membawa manfaat, makanan lokal berbahan dasar singkong akan naik kelas, karena tersaji dalam acara-acara resmi kenegaraan. Juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani, dan manfaat lain dapat dirasakan oleh pejabat sendiri, terhindar penyakit seperti kolesterol.

Namun surat edaran itu ternyata malah sangat menyakitkan bagi para petani singkong. Walau singkong acap dianggap makanan kelas bawah, ternyata ada fakta menarik yang diperoleh. Indonesia belakangan ini ternyata tercatat sudah menjadi negara pengimpor singkong terbesar.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, dikatakan jumlah impor singkong cukup fluktuatif. Pada tahun 2012 impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US\$ 3,4 juta. Sementara hingga pertengahan tahun 2013, jumlah impor singkong 100 ton.

Berdarnya surat edaran itu malah memunculkan pertanyaan, apakah surat edaran sang menteri secara otomatis dapat mensejahterakan petani, khususnya petani singkong? ■



MENCARI PENUMPANG GELAP BAILOUT CENTURY

Oleh: Soemitro

Nasib Boediono digantung Budi Mulya. Dua mantan orang penting itu merupakan atasan dan bawahan di Bank Indonesia (BI) tahun 2008 - 2009 silam. Budi duduk sebagai Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, sementara Boediono sebagai atasannya, yakni sebagai Gubernur BI.

Gantungan berada di Mahkamah Agung (MA), setelah Budi yang merupakan terdakwa kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mengajukan

kasasi ke MA. Begitu halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proses hukum lanjutan tersebut dilakukan KPK dan Budi Mulya karena sama-sama tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. KPK menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan PT DKI Jakarta belum cukup menjadi alat bukti untuk mengembangkan kasus ini ke pihak-pihak lainnya. Sementara Budi Mulya yang berharap mendapatkan keringanan justru mendapat hukumannya diperberat.

Awalnya, Budi Mulya dijatuhi

majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan penjara. Budi dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pemberian FPJP pada bank Century dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Di tingkat banding yang disampaikan oleh hakim Ketua Widodo pada 3 Desember 2014, PT DKI Jakarta memperberat hukuman Budi menjadi 12 tahun penjara. Sedangkan, untuk pidana denda tetap Rp 500 juta subsider lima bulan penjara. Alasan yang

menyebabkan hukuman Budi diperberat adalah menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar. Perbuatan Budi juga menimbulkan gangguan laju pertumbuhan perekonomian negara.

Budi dianggap melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

“Saya tahu dan meyakini bapak saya tidak bersalah. Dan saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih jeli, ayo kita buka juga kasus Century ini. Kalau mau dicari penumpang gelapnya, ayo kita cari siapa penumpang gelapnya. Kami berharap keadilan dari Allah akan diberikan kepada kami,” ucap Nadia Mulya usai membesuk ayahnya Budi Mulya di Gedung KPK, Senin (15/12) pekan lalu.

Dengan adanya pengajuan kasasi ke MA, KPK mengurungkan rencana ekspose untuk menelisik dugaan keterlibatan pihak-pihak yang turut melakukan korupsi dalam kasus Bank Century. Salah satunya mantan Gubernur BI yang juga mantan Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono. KPK menunggu proses kasasi hingga diputus.

“Kami tunggu lagi satu putusan, tingkat MA supaya inkraft. Kalau sudah inkraft di MA baru bisa kita tindaklanjuti putusan yang menyebut siapa-siapa aja orang yang terlibat dalam itu,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Senin (15/12) pekan lalu.

Ditekankan bahwa penentuan nasib Boediono menjadi tersangka tidaklah mudah, karena pihaknya harus memegang bukti-bukti yang valid. Putusan MA itulah yang nantinya diharapkan membuka tabir keterlibatan Boediono. Disampaikan pula bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di KPK tidak mengandalkan pada dua alat bukti semata.

Atas dasar itu, KPK tidak menggunakan putusan ditingkat banding, melainkan kasasi di MA hingga inkraft.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sebelumnya mengungkap bagaimana prestasi lembaganya dalam memberantas korupsi. Prestasi yang menjadikan lembaganya dihormati negara-negara lain. Bahkan reputasinya mengalahkan KPK Hongkong yang merupakan contoh lembaga pemberantasan korupsi terbaik di dunia. Banyak negara kemudian merujuk penegakan hukum di Indonesia.

Dalam perjalannya selama 10 tahun terakhir, diungkapkan pihaknya telah menangani 435 kasus korupsi. Selain pejabat setingkat menteri, kepala daerah, diplomat, lembaga ad hoc ini bahkan tidak segan-segan menghabisi karir petinggi lembaga hukum lain. Misalnya mantan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo. Teranyar adalah penetapan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century.

Pernyataan Adnan dibantah oleh pimpinan KPK lainnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjajanti menegaskan bahwa pernyataan Adnan tidak benar, karena hingga kini belum ada ekspose kasus atas nama Boediono.

Publik ramai-ramai mempermasalahkan simpang-siurnya penetapan Boediono sebagai tersangka. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Fariz Fachryan misalnya. Ia menyebut ada informasi yang kebablasan di internal KPK hingga keluar pernyataan tersebut.

Semestinya, sebelum menyampaikan informasi ada validitas daya yang dipegang. Dengan begitu informasi tidak menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan KPK sendiri. Dan, pernyataan

keterlibatan Boediono semestinya disampaikan secara kelembagaan, bukan personal Adnan Pandu Praja.

“Tidak seharusnya hanya lewat perkataan pribadi saja, tapi harus dari kelembagaan,” tegasnya kepada Aktual.

Putusan banding Budi Mulya di PT DKI Jakarta sendiri tidak merubah pihak-pihak yang diduga ikut bersama-sama dengan Budi Mulya melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Diantaranya, Boediono, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI.

Selain itu juga ada nama Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Amar putusan hakim PN Tipikor yang disampaikan anggota majelis hakim Made Hendra, 16 Juli 2014, Budi Mulya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni dengan memberikan persetujuan FPJP dengan itikad tidak baik karena untuk mencari keuntungan diri sendiri dan juga dalam penyelamatan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang ada di Bank Century dan tindakan-tindakan lain berdasarkan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme.

Di samping itu hakim menilai pemberian FPJP tidak dilakukan dengan analisis mendalam dan berdampak positif sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp8,5 triliun yaitu FPJP sebesar Rp689,39 miliar, kerugian saat pemberian penyertaan modal sementara dari

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senilai Rp6,7 triliun hingga Juli 2009 dan 1,2 triliun pada Desember 2013. ■

Hasyim: Urusan Binatang Bukan Politik

Hasyim Djojohadikusumo mundur dari Ketua Dewan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Surat pengunduran diri disampaikan langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (10/12).

Ia tercatat hanya menjalani tugasnya tersebut selama satu setengah tahun, yakni sejak 7 Mei 2013. Saat itu, ia diangkat langsung oleh Gubernur Joko Widodo melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 737 Tahun 2013.

Hashim yang dikenal mencintai binatang dan pernah membuat konservasi harimau di Sumatera, badak Sumatera yang terancam punah dan konservasi orangutan serta beruang madu di Kalimantan itu selanjutnya menjalani tugas barunya sebagai Kepala BLUD TMR.

Belakangan, adik Prabowo Subianto mengaku waktunya terbatas untuk mengurus tempat wisata kebanggaan warga Ibukota.

“Melihat perkembangan yang ada, keterbatasan waktu dan alasan profesional serta operasional, tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri,” ucap Hasyim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Hasyim menepis anggapan mundurnya dari Ketua Dewan Pengawasan BLUD Taman Margasatwa Ragunan dilatarbelakangi urusan politik. Yakni sejalan dengan mundurnya Ahok dari keanggotaan Partai Gerindra, partai yang menghantarkan Ahok menjadi Wakil Gubernur dan naik menjadi Gubernur DKI.

“Ini urusan dengan politik,”

Ahok mundurnya menjabat Pengawasan memiliki yang baik. Belitung Hasyim

binatang, hewan, tidak katanya.

menyangangkan Hashim. Apalagi selama sebagai Ketua Dewan BLUD TMR, Hasyim kinerja dan produktivitas

Di sisi lain, mantan Bupati Timur mengapresiasi kerja untuk kemajuan Ragunan yang dituangkan dalam bentuk laporan 500 hari kerja.

Ke depan, Pemerintah Propinsi DKI bersiap mencari pengganti yang kinerjanya sepadan dengan Hasyim.

“Ya mesti cari yang mirip-mirip. Susah cari penggantinya yang punya duit tapi mau kerja. Kalau bisa orang yang punya hobi dan punya hati. Baru bisa bikin laporan itu,” katanya. / Soemitro



Harta Gayus Dilelang Kejagung

Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI akan melelang harta benda milik eks pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan. Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan sistem terbuka pada 23 Desember 2014.

Disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha PPA Kejagung Murtiningsih, mencakup 31 keping logam mulia, satu unit mobil merk Ford, tanah seluas sekitar 260 m², tanah di Kelapa Gading dan satu unit apartemen di Cempaka Mas.

Lelang merujuk pada putusan PN Jakpus No 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012 jo Putusan PT DKI No 22/Pid/TPK/2012/ PT DKI tanggal 21 Juni 2012 jo Putusan MA No 52K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas nama terpidana Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan.

Eksekusi dan verifikasi harta Gayus dilakukan sebelumnya di Kantor Pusat Bank Indonesia, 17 November 2014, oleh Kejaksaan Negeri Jakpus.

“Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Datas Ginting dan Kepala PPA Kejaksaan Chuck Suryosumpeno langsung memimpin proses eksekusi dan verifikasi saat itu,” kata Murtiningsih. / Nebby Mahbubirrahman



Rekening Gendut: KPK Kejar Foke, Kejagung Berencana Panggil Gubernur Sultra

Kejaksaan Agung (Kejagung) isyaratkan memanggil Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang diduga memiliki rekening gendut berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kan sudah dipanggil dua kali, tidak menutup kemungkinan akan menindaklanjut," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyo Pramono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19/12).

Widyo menegaskan, semua laporan transaksi mencurigakan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik oleh Kejaksaan Agung. "Tanya sama pak Dirdik semua semua ditindaklanjut dengan baik," jelasnya.

Namun, lanjut Widyo, pihaknya perlu mengetahui bahwa nama-

nama yang dilaporkan PPATK tidak seluruhnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. "Tidak semua diitung oleh kejaksaan, ada di 2 nama di kepolisian dan pidana umum (kejagung), pidana umum ada 2 terkait dengan Asian Agri dan ada 6 itu Benkalis dan 1 nama di Bali," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi proses perkembangan Nur Alam, Widyo mengaku pihaknya tidak akan kesulitan untuk memproses seluruh rekening mencurigakan tersebut. "Ya tunggu dulu, semua masih diproses penyidik semua yang kerjakan," tandasnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung



Korupsi Videotron, Anak Eks Menkop dan UMKM Dibui 6 Tahun

Afrian, anak mantan Menteri Koperasi dan UMKM Syarif Hasan, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/12).

Riefan terbukti bersalah sesuai dakwaan primer dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kemenkop dan UMKM.

Pembelaannya dinilai tidak relevan sehingga ditolak Majelis

Hakim.

Majelis Hakim yang diketuai Nani Indrawati mengatakan juga mewajibkan Rievan membayar pengganti sebesar Rp 5.392 miliar. Apabila dalam sebulan tidak

membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita jaksa.

"Jika harta benda tidak cukup, maka terpidana dipidana penjara selama dua tahun," kata Nani.

Vonis Rievan sendiri lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 7 tahun penjara. Dalam vonisnya, ia dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ Nebby Mahbubirrahman

mengatakan beberapa waktu lalu Kepala PPATK M Yusuf menyerahkan transaksi mencurigakan kepala daerah ke Kejaksaan Agung. "Mengkaji ada delapan orang kepala daerah baik yang aktif maupun sudah mantan," katanya di Kejaksaan Agung.

Disinggung soal nama kedelapan kepala daerah tersebut, Tony masih enggan memberitahukan nama kedelapan kepala daerah tersebut yang mempunyai transaksi mencurigakan. "2 mantan Gubernur, 1 Gubernur aktif, 5 bupati dan mantan Bupati, 1 mantan sudah dilakukan penyelidikan, 1 telaah. Gubernur aktif telaah. 1 tahap penuntutan. 4 telaah," pungkasnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebelumnya mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) masuk dalam daftar kepala daerah yang miliki rekening gendut yang dilaporkan oleh PPATK kepada KPK "Iya dia (Foke) ada," katanya di Jakarta.

Selain nama Foke, kata Abraham juga ada juga nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang masuk dalam daftar rekening gendut itu. "Iya, ada juga Gubernur Sulawesi Tenggara," jelasnya.

Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke Jaksa Agung HM Prasteyo. LHA yang diserahkan merupakan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan salah satu orang hebat di Indonesia. Namun, PPATK enggan membocorkan siapa orang yang dimaksud.

Dia menegaskan total LHA yang diserahkan ada 10. Dari laporan tersebut diduga akan menghasilkan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi. PPATK juga pernah melaporkan hasil analisis 10 kepala daerah terdiri atas gubernur dan bupati itu disetorkan ke Kejaksaan pada akhir 2012. ?Dari informasi yang beredar salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. / Nebby Mahbubirrahman





BULAN MADU SOEKARNO-MAO ZEDONG

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

Etnis China telah ke Nusantara jauh sebelum abad masehi. Kehadiran mereka terbukti dari situs dan benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga dan Majapahit. Berbagai macam kontak antara penduduk daratan China dengan Nusantara terjadi saat China memasuki zaman keemasan Dinasti Tang, Dinasti Ming dan Dinasti Qing.

Semasa Ming pada abad 15, Laksmana Cheng Ho tahun 1405-1433 menggelar ekspedisi ke 40 negara. Termasuk ke Nusantara hingga tujuh kali. Cheng Ho menjumpai banyak perkampungan China di pantai

Utara Jawa yang berperan penting membuka dan mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Mereka umumnya berdagang kain, kelontong, bahkan pengrajin dan pedagang besar antarpulau dan antar-negeri. Usaha-usaha itu membuat perantau China ini turut andil besar terhadap perkembangan kota-kota pelabuhan seperti Palembang, Jambi dan Banten.

Muhibah Cheng Ho ini momentum simbolik keeratan hubungan Indonesia China masa itu. Tahun 1600-an terjadi migrasi besar etnis China ke Nusantara oleh kolonial Belanda guna mengisi sektor jasa di Batavia yang kurang penduduk saat itu. Salah satu

hasil interaksi budaya adalah bedug di masjid-masjid Indonesia. Bedug merupakan bawaan asli asal China.

Banyak perantau China (Hua Kiao) ke Nusantara ini yang datang membawa keluarga dan membentuk perkampungan yang disebut "kampung China" atau dikenal sebagai "Pecinan". Abad 19 pecinan di kota-kota pedalaman Jawa pun digunakan Belanda guna memperluas jalur distribusi hasil bumi.

Belanda mempercayakan perdagangan perantara pada Huakiao yang ulet dan dikenal trampil, guna membangun sistem perdagangan di Nusantara. Sejumlah Hua Kiao ini juga pemilik usaha yang berhubungan langsung dengan jaringan produksi antar pulau milik VOC.

Pasca era Kolonial, Hua Kiao tetap bertahan di sektor perdagangan. Mereka bahkan mampu memperluas jaringan bisnisnya. Karena pengusaha pribumi tak siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Belanda, sehingga diambil alih pengusaha China. Akibatnya sektor perdagangan kecil

dan menengah pun dikuasai Hua Kiao. Tahun 1950, Hua Kiao mendominasi bisnis eceran dan pertanian.

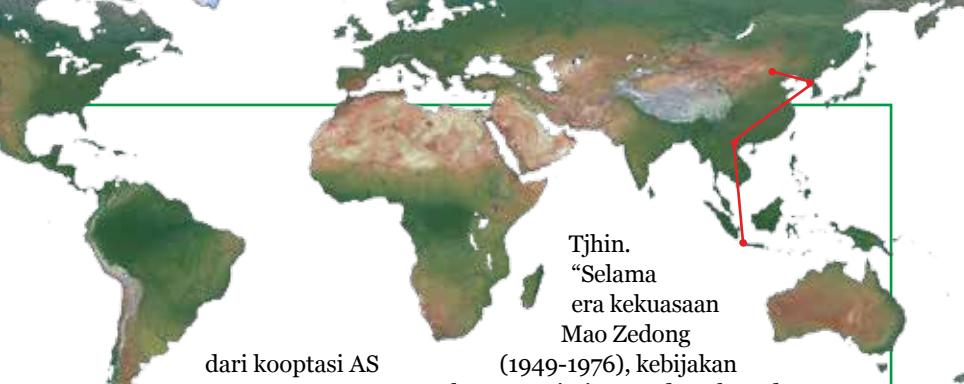
Secara domestik, keberadaan Hua Kiao di Nusantara berperan penting bisa mendukung kepentingan Indonesia. Apalagi jaringan mereka secara faktual amat kuat, sebagaimana terlihat pada *network* antar pengusaha Hua Kiao di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan China. Jaringan ini bukan hanya bersifat professional bisnis, namun terutama berdasarkan garis atau ikatan keluarga.

Hampir di tiap kota di Indonesia ada pecinan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pusat hunian komunitas tradisi China, seperti Barongsai, Liang-liong, serta Kelenteng tempat ibadat umat Konghucu. Hua Kiao Indonesia juga bergiat di bidang sosial, pendidikan, kebudayaan dan politik. Terbukti dari keterlibatan Liem Koen Hian anggota BPUPKI dalam sidang-sidang membahas pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana acap disebut Soekarno dalam pidato kelahiran Pancasila 1 Juni 1945.



Blok Asiatic Versus Nekolim

Pasca kemerdekaan semasa pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan Indonesia China yang dipimpin Mao Zedong (1949-1976) sangat erat. Setelah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 guna mendukung gerakan pro-kemerdekaan di banyak benua, Soekarno berupaya membentuk kekuatan Non-Blok yang bebas



dari kooptasi AS maupun Soviet.

Mao pun berada di jalur yang sama, berambisi membentuk kekuatan revolusioner yang tak bergantung pada Blok Barat AS dan Blok Timur Uni Soviet. Sejarawan Belanda Antonie Dake dalam buku "In the Spirit of the Red Banteng" (1973), menulis keinginan Perdana Menteri Chou En-Lai membentuk "Blok Asiatic yang meliputi lebih dari 700 juta orang" dipelopori China, Korea Utara, Vietnam Utara, Kamboja, dan Indonesia.

Bak gayung bersambut, Soekarno saat merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1965 berpidato melontarkan "Poros Peking (Beijing)-Hanoi-Pyongyang-Jakarta" sebagai opsi tandingan dari kekuatan bipolar Blok Barat dan Blok Timur. Wacana poros itu diangkat Soekarno akibat mencurigai AS dan Inggris yang ngotot ingin menjungkalkan Pemimpin Besar Revolusi ini dengan mensponsori pemberontakan PRRI/Permesta, mendanai beberapa partai anti Soekarno pada pemilu 1955, dan upaya pembunuhan atas diri Bapak Marhaenisme ini pada tahun 1957.

Meski semua upaya Barat itu gagal, namun konspirasi Blok Barat itu mendorong Soekarno kian merapat kepada China dan beberapa negara komunis Asia lain. Alhasil manuver Soekarno selaku Panglima ABRI mendekati Cina dan beberapa negara komunis Asia, bisa difahami. Tersusun tahun 1963, saat Indonesia mengkonfrontasi Malaysia yang didukung Inggris, hingga Soekarno melancarkan perang melawan Nekolim (Neo Kolonialisme Imperialisme).

China yang berupaya membentuk kekuatan baru pasca retak hubungan dengan Uni Soviet, sigap mendukung politik konfrontasi Soekarno. Ambisi Cina ini terpapar sesuai analisa peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Christine

Tjhin. "Selama era kekuasaan Mao Zedong

(1949-1976), kebijakan luar negeri Cina condong kepada aliran kiri-radikal dengan memelihara jaringan dengan gerakan-gerakan komunis dan kaum peranakan Cina di penjuru Asia. Itulah sebabnya saat itu Republik Rakyat Cina agresif menjalin hubungan dengan warga Indonesia-Cina," tulis Tjhin dalam tesis S2-nya di Australian National University 2002.

Ambisi Blok Asiatic ini membuat China menilai pemberlakuan PP No.10 Tahun 1959 yang mendiskriminasi hak-hak ekonomi warga keturunan China di Indonesia, karena bagi Beijing itu Cuma kontradiksi minor yang tidak boleh mengalahkan masalah kontradiksi mayor dalam menghadapi bipolarisme dunia. "Itu hanyalah sebeset luka di kulit," kata Menteri Luar Negeri Cina, Chen Yi, menanggapi polemik PP 10/1959.

Beijing pun bersikap tenang saat mendengar ada sentimen anti komunis di Indonesia yang didukung TNI AD. Hubungan Indonesia-Cina pun kian erat seiring kian seringnya saling kunjung antar pejabat kedua negara, mulai dari tingkat presiden, menteri, perwira militer, hingga pejabat partai komunis. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan jargon Nekolim Bung Karno pun direstui China. Antonie Dake memaparkan hubungan Indonesia-Cina saat menjelang G30S tengah mengalami "masa bulan madu."

Bulan madu ini ditengarai dari bantuan ekonomi China bagi Indonesia. Chen Yi saat ke Jakarta tahun 1961 memberi komitmen kredit 50 juta USD. Tiga tahun kemudian Chou En-Lai saat menjamu Soekarno di Shanghai, menambah bantuan 30 juta USD untuk pabrik tekstil di Indonesia. Bahkan Wakil Perdana Menteri Subandrio pernah menyebut bantuan Cina akan bertambah hingga sekitar 100 juta USD.

China juga menawarkan kerjasama militer termasuk pengembangan fasilitas teknologi nuklir. Niat

Indonesia mengembangkan nuklir bersama Cina itu menyentak perhatian masyarakat dunia, terutama kalangan Barat. Apalagi mengingat Cina berhasil pertama kali meledakkan senjata nuklir buatan sendiri pada Oktober 1964. "Muncul keresahan di kalangan pengamat waktu itu bahwa kerjasama itu berupa Cina akan mengetes lagi senjata nuklirnya di perairan Indonesia sementara pemerintahan Soekarno akan menerima imbalan," tulis Mayor Robert Cornejo dalam analisa risetnya di jurnal "Nonproliferation Review" (2000).

Chou En Lai bahkan menyarankan mempersenjatai buruh dan tani jadi Angkatan Kelima dari ABRI, sesuai sukses gerilya Mao Zedong merebut kekuasaan Jendral Chiang Kai Sek dengan mengerahkan petani dan buruh di pedesaan. Saran untuk sukses politik konfrontasi ini, diyakini Chou efektif membantu petani dan buruh di perbatasan Indonesia–Malaysia yang niscaya lebih memahami seluk-beluk wilayahnya. Situasi regional Asia yang hangat sejak konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1963, kian memanas dua tahun kemudian sejak Indonesia memutuskan ke luar dari PBB, akibat dinilai Soekarno telah terkooptasi kepentingan Barat.

Cina merestui sikap Indonesia. Dalam



jamuan makan malam untuk Wakil Perdana Menteri Subandrio, di Peking 24 Januari 1965, Chou En-lain menandaskan komitmen Cina. "Bila kaum imperialis Inggris dan Amerika melancarkan perang atas Indonesia, maka rakyat Cina tidak akan berdiam diri," kata Chou.

Konsep Menelikung Soekarno

Konsep angkatan kelima itu tak langsung diutarakan Cina kepada Soekarno, namun melalui pejabat berpengaruh, Wakil PM I Subandrio dan DN Aidit, Ketua PKI yang saat itu merupakan partai terbesar di Indonesia. Soekarno, menurut Dake, semula tak antusias. Apalagi ada pertimbangan mendapat resistensi dari militer, terutama TNI AD.

Sebaliknya Aidit antusias. Pertimbangannya bukan lagi mendukung konfrontasi terhadap Malaysia, tapi demi cita-cita partai. Dengan jumlah pendukung tiga juta anggota dan 20 juta simpatisan, PKI berkepentingan memiliki milisi bersenjata. Aidit saat itu tidak berambisi menjungkalkan Soekarno dengan kekerasan, karena sebagai partai terbesar yang mendapat angin dari Soekarno, tampilnya PKI ke tumpuk kekuasaan hanya tinggal menunggu waktu. Bagi Aidit konsep Angkatan Kelima bisa dipakai PKI sebagai sarana melawan resistensi AD maupun kelompok Islam. Termasuk jika terpaksa juga guna menelikung Soekarno.

Karuan konsep Angkatan Kelima yang bukan di bawah komando TNI, semakin ditentang A.H Nasution dan Ahmad Yani. Hubungan TNI, khususnya AD dengan Soekarno pun menegang. Ketegangan pun membuncah akibat tujuh pimpinan AD tewas diculik "Gerakan 30 September" (G30S). Gerakan sekelompok militer yang diindikasikan melibatkan PKI ini secara lihay berhasil ditumpas Jendral Soeharto.

Kendati hingga kini belum ada bukti kuat keterlibatan China dalam G30S, namun Beijing diduga mengetahui sebatas rencana penculikan itu. Ketidakpekaan China yang pada 5 Oktober 1965 tak mengirim seorang

utusan pun saat pemakaman jenazah para jendral di TMP Kalibata ditambah keengganannya Kedutaan China mengikuti anjuran pemerintah Indonesia untuk mengibarkan bendera nasionalnya setengah tiang, sebagai tanda berkabung, seperti kedutaan negara lain, memicu protes Indonesia pada tanggal 11 Oktober 1965.

Hal itu menyulut kemarahan militer dan ormas anti komunis. China dituduh mendukung upaya PKI. Terjadilah amuk oleh perubahan radikal di China sejak Mao memberlakukan "Revolusi Kebudayaan" pada 1966 hingga 1969. Semasa itu seluruh tatanan dan nilai yang dianggap feudal dan borjuis di China dihancurkan. Gejolak ini tercermin dalam radikalisasi politik luar negeri China, Apalagi radio Peking dan kantor berita Xinhua gencar mengagitasasi TNI AD yang dituding reaksioner dan antek imperialis AS. Soeharto pun membekukan hubungan dengan China pada Oktober 1967.

Pembekuan hubungan diplomatik itu bukan hanya menandai perubahan radikal yang menggagalkan Poros Jakarta-Peking yang dicita-citakan Soekarno, bahkan membuat kedua sekutu yang sempat berbulan madu itu akhirnya terputus selama 23 tahun.

Ali Baba Menjadi Cukong

Membekunya hubungan Jakarta dan Beijing, otomatis menghangatkan hubungan Indonesia dengan Taiwan, meski Indonesia tetap mempertahankan politik Satu Cina hanya mengakui RRC yang beribukota di Beijing dan menolak hubungan diplomatik dengan Taiwan (ROC) yang beribukota di Taipei dan dipimpin oleh generasi penerus Jendral Chiang Kai Sek.

Pada awal 1967, Soeharto memberlakukan produk hukum pertama Orde Baru berupa UU No.1 Tahun 1967 tentang investasi asing. Dengan catatan modal milik warga China yang tinggal di Indonesia (Hoa Kiao), tak dianggap modal asing. Sedangkan bagi orang China di luar Indonesia dianggap modal asing. Para pemodal asing ini mendapat banyak fasilitas dari pemerintah. Tak heran semasa itu banyak modal asing yang

masuk dan orientasi pembangunan ekonomi Soeharto berhasil mengurangi inflasi yang terjadi dari 650% menjadi 15% per tahun.

Kepentingan rezim Soeharto memanfaatkan modal Hoa Kiau terlihat dari pembentukan Indonesian Business Center - IBC tanggal 6 Juni 1968 di Jakarta. IBC yang melibatkan petinggi negara dan pebisnis China didirikan guna sukses Repelita. Soeharto pun memobilisasi NDC (National Development Centre) untuk menghimpun modal Hoa Kiau demi pembangunan. Kerja sama dengan China asing ini ditempuh Soeharto, akibat sistem Ali Baba era Soekarno gagal. Karena banyak lisensi yang didapat pengusaha pribumi lokal dari pemerintah, akibat bangkrut lalu dijual kepada para Hoa Kiau, yang kemudian menikmati lisensi kemudahan bisnis dari pemerintah itu.

Praktek sistem Ali Baba yaitu lisensi dipegang Ali Pribumi tetapi modal dan hasil dikuasai Baba Hoa Kiau, pada era Orde Baru Soeharto berkembang dan berubah jadi Sistem Cukong ini lazim dikenal di negara-negara Asia Tenggara. Sistem cukong ini terkait dengan kontak-kontrak pemerintah, kredit investasi, dan pendanaan lain. Sehingga 90% proyek bantuan keuangan diperkirakan 90% mengalir ke tangan para Cukong. Ini mengindikasikan ada "permainan" antara pemerintah dan para Cukong. Hal ini yang memicu kebencian pebisnis pribumi terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, investor asing dari Barat dan Jepang cenderung memilih pebisnis Cina sebagai partner katimbang pebisnis pribumi karena dianggap lebih baik dari segi pengalaman, modal, dan kemampuan teknis.

Ambisi Internasional Soeharto - SBY

Tahun 1971, menyusul terciptanya hubungan diplomatik RRC dengan AS berkat diplomasi pingpong. ROC atau Taiwan pun didepak dari PBB. Posisi ROC pun digantikan oleh RRC sebagai anggota PBB, termasuk sebagai satu dari lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, bersama AS, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis.

Sejak bersahabat dengan AS,

perwakilan RRC pun mulai mendekati Indonesia. Begitu berpolitik luar negeri lebih moderat terhadap negara-negara Dunia Ketiga, RRC berhasil membina hubungan diplomatik dengan tiga dari lima negara ASEAN saat itu, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 1974 dan 1975. Tapi Singapura memilih tak akan menormalisasikan hubungan dengan Beijing sebelum Jakarta melakukannya.

Semasa Deng Xiaoping, tahun 1973 Soeharto menyatakan Indonesia bersedia menormalisasikan hubungan dengan RRC, jika China benar-benar bersahabat dan berhenti memfasilitasi para mantan pimpinan PKI. Akhir 1980an, niat menormalisasikan hubungan Jakarta-Beijing muncul. Tapi kalangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun kelompok Islam, menentangnya. Sebaliknya usahawan Indonesia yakin normalisasi bisa memacu ekspor ke RRC dan menggairahkan bisnis domestik. Departemen Luar Negeri menilai normalisasi akan memproyeksikan citra positif Indonesia sebagai negara pendiri nonblok termasuk mempermudah kepentingan nasional atas sejumlah masalah internasional terkait China.

Karena pergeseran tatanan ekonomi dunia dan hasrat berperan utama dalam dunia internasional, Soeharto sejak 1984 menempuh kebijakan lebih terbuka atas RRC. Terutama terkait kepemimpinannya selaku tuan rumah gerakan nomblok (NAM) maupun APEC, dsb. Tanggal 23 Februari 1989, Menlu Ali Alatas mengumumkan Jakarta mungkin mencairkan hubungan diplomatik dengan Beijing, Sebelumnya Menlu RRC Wu Xuegian saat ke Bandung, menyatakan Cina telah berhenti mendukung PKI.

Hubungan Indonesia-Cina pun membaik setelah peringatan 30 tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1990. Tanggal 14 November 1989, Soeharto berkunjung ke Beijing memperkuat hubungan itu. Awal Juni 1991, Presiden Yang Shangkun ke Indonesia membalaung kunjungan kenegaraan itu.

Pasca Soeharto lengser, sejak 1998 hubungan bilateral ditingkatkan serius. Indonesia memposisikan China sebagai

harapan. Presiden Abdurrahman Wahid sempat mewacanakan poros China, Indonesia, dan India, sebagai alternatif kekuatan global terbaru atas NAFTA (AS, Canada, Mexico) dan Masyarakat Eropa. Wacana ini sirna seiring pelengseran Gus Dur.

Saat Presiden Megawati Soekarnoputri, kerjasama Indonesia dan China berkembang pesat dengan MoU pembentukan forum energi kedua negara tanggal 24 Maret 2002. Itulah payung investasi China di Indonesia di ranah energi. Kerjasama bilateral melesat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) tanggal 25 April 2005 di Jakarta, saat Presiden Hu Jintao menghadiri peringatan 50 tahun KAA. Kemitraan ini mencakup politik, keamanan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang lain.

Selama dua periode pemerintahan SBY, diplomasi ekonomi mengundang investasi China di Indonesia dilancarkan gencar. Termasuk di bidang teknologi antariksa. Meski belum berstatus anggota tetap, Indonesia masuk Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) organisasi antariksa milik China. APSCO merupakan alternatif bagi negara-negara yang berada di bawah tekanan isu-isu hak asasi manusia dan reformasi demokrasi oleh pihak Barat. Dalam APSCO, China berperan sebagai penyedia dan pembelajaran teknologi bagi kawasan kurang berkembang (less developed) di Asia dan kawasan lain, menggeser Jepang yang lebih dulu unggul pada kemampuan dirgantara ini.

Di bidang pertahanan dan keamanan, meski ada ganjalan terkait klaim di Kepulauan Spratley di Laut China Selatan oleh negara-negara sekitar wilayahnya, termasuk Indonesia, kerjasama bilateral dengan China, mampu menjadi opsi tepat. Terutama bagi modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI yang acap terkendala isu HAM dsb dari pihak Barat.

Lantas bagaimana kini dengan era Presiden Joko Widodo? Adakah hasrat menikmati bulan madu kedua? ■

Petral Takkan Bubar

Oleh: Wahyu Romadhony

Ari Soemarno pernah punya mimpi setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden ke 7 Indonesia 20 Oktober lalu. Mantan Direktur Utama PT Pertamina itu ingin membekukan PT Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura. Itulah rekomendasi Ari sebagai Ketua Pokja Energi yang menjadi bagian dari kantor transisi pemenangan Jokowi-JK.

Dalam surat rekomendasi yang diterima Majalah AKTUAL, Ari menargetkan masalah pembekuan Petral bisa direalisasikan 1 minggu setelah pemerintahan terbentuk. "Membekukan Petral dan mengalihkan kegiatannya ke Kantor Pusat Pertamina dibawah organisasi Integrated Supply Chain (ISC) yang telah direformasi dan melapor langsung ke Dirut Pertamina," seperti dikutip dalam laporan rekomendasi tersebut.

Benar saja, 16 November Menteri ESDM Sudirman Said langsung membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau yang lebih di kenal dengan sebutan Tim Anti-Mafia Migas. Salah satu tugas utama Tim yang dipimpin oleh ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri itu mengkaji Petral.

Segala opini tentang Petral memang membuat masyarakat selalu menuduh Petral penyebab utama jika ada perubahan kebijakan di sektor energi. Misalnya saat pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi BBM. Maka sejumlah cibiran negatif akan dialamatkan ke Petral. Pendek kata Petral selalu dianggap sarang mafia migas.

Padahal Ari Soemarno pernah menjadi Presiden Direktur Petral. Ia juga sebagai konseptor ISC badan

yang dibentuk untuk mengontrol Petral. Ari membentuk ISC tahun 2008. Selain Ari di badan ini Sudirman Said pernah duduk sebagai Deputi Direktur tahun 2013. Sudirman salah satu pihak yang kerap menyuarakan perlunya Petral dibubarkan.

Selain itu Menteri BUMN Rini Soemarno juga memiliki pandangan yang sama. Ia menyebut Petral banyak merugikan Negara. "Masih belum kami lihat (untung ruginya), kalau saya lihat sih banyak ruginya," kata Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/11).

Faisal lantas diterbangkan ke Singapura untuk mengunjungi kantor Petral. Pertamina sebagai induk usaha membuka pintu lebar-lebar. Bahkan menantang Faisal mengaudit Petral. Hasilnya semangat membubarkan Petral malah berbalik. Faisal menyebut Petral tak layak dibubarkan. "Soal Petral, kami sampai saat ini tidak melihat itu sesuatu yang harus dimusnahkan, kita ingin jadikan lebih transparan saja," kata Faisal di Gedung Bank Indonesia, Kamis (4/12).

Rabu 17 Desember lalu Faisal mengundang Pertamina dan direksi Petral untuk mempertanyakan sejumlah asumsi publik tentang Petral. PT Pertamina (Persero) diwakilkan Direktur Pengolah Rachmat Ardadi, Sekertaris Perusahaan Pertamina Nursatyo Argo dan Vice President Corporate Communication Ali Mundakir. Direktur Utama Petral Bambang Irianto juga hadir dalam pertemuan ini.

Selama 5 jam Pertamina dan Petral menjawab pertanyaan yang dilontarkan Faisal dan timnya. Khususnya terkait asumsi Petral



Tim RTKM Panggil Pertamina dan Petral.
Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri (tengah), menegaskan bahwa tidak ada kesimpulan apapun dari pertemuannya dengan pihak PT Pertamina (Persero) sekaligus anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (17/12/2014).

sarang mafia migas. Alhasil. Faisal mengakui banyak kesalahpahaman yang tercipta atas keberadaan Petral di Singapura.

"Petral mau di Jakarta sebenarnya nggak ada urusan untuk itu. Petral lebih berguna di Singapura sebagai perusahaan trading dari tanah air. Salah satunya mendistribusikan minyak mentah dari beberapa perusahaan migas yang dibutuhkan Indonesia," ujarnya.

Faisal menilai, berkat Petral efisiensi kerja Pertamina membeli minyak mentah lebih cepat tercapai. "Karena trading company minyak



mentah dan BBM banyak berada di sana sehingga bisa langsung membeli," jelas Faisal.

Ia juga mengaku baru mengetahui ternyata Petral selama ini berperan sebagai *trading company* pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Indonesia. Bahkan diakui Faisal bahwa ternyata Petral telah menyewa *blending facility* di Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Saya juga baru tahu. Mereka mem-blend Ron 92 untuk menghasilkan Ron 88. Kita nggak tahu selama ini," katanya.

Selama ini Petral dituding sebagai penyebab naiknya harga BBM jenis premium atau yang disebut Ron 88. Pasalnya BBM jenis ini tak dijual di pasar internasional. Ternyata dalam pertemuan ini terungkap keharusan Petral membeli Ron 88 karena kebijakan Dirjen Migas.

"Baik Petral maupun Pertamina, tidak bisa meningkatkan kualitas

BBM subsidi. Karena ada masalah terkait keterbatasan otoritas, di mana ada aturan dari Dirjen Migas, bahwa spesifikasi BBM subsidi seperti Premium harus RON 88," ujarnya.

Faisal menegaskan Pertamina harus membayar impor BBM lebih mahal lantaran BBM jenis RON 88 sudah sangat langka di pasaran. Tim merekomendasikan untuk mengubah spesifikasi BBM subsidi ke RON 92 dari RON 88. Petral dan Pertamina mengaku harus menurunkan kualitas BBM yang diimpor dari RON 92 menjadi Ron 88.

Pertanyaan yang acap disuarakan untuk menuduh Petral ialah kenapa Pertamina harus impor BBM setiap hari melalui Petral. "Biaya produksi BBM di kilang minyak Pertamina itu ternyata jauh lebih mahal daripada impor. Di atas MOPS (Mean of Plots Singapore), bisa lebih mahal 10 persen dari harga impor BBM," ujarnya.

Ia menjelaskan, memang

lebih murah impor BBM daripada produksi sendiri. Namun bila hal tersebut terus dilakukan, maka kilang minyak dalam negeri terancam tutup semua. "Kalau pilih impor memang lebih hemat, tapi itu artinya kilang dalam negeri tutup semua. Energi ini bukan soal harga saja, tapi menyangkut ketahanan energi bangsa, kalau ada apa-apa misalnya harga minyak melonjak tinggi, bahaya bagi pasokan energi dalam negeri," ujarnya.

VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menjelaskan, mahalnya ongkos produksi BBM disebabkan kilang-kilang Pertamina sudah berusia lanjut. "Kilang Pertamina ini ada yang dibangun tahun 1930 dan ada yang 1948, yang mengolah crude Indonesia yang sebagian besar itu light sweet, sehingga harganya juga jauh lebih mahal. Padahal biaya pokok produksi BBM itu 93 persennya adalah minyak mentah," kata Ali.

Wacana pemindahan Petral ke Indonesia juga disangskakan oleh Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, jika Petral yang bersarang di Singapura dibubarkan, maka akan berdampak pada kerugian. Pasalnya, peredaran uang di Petral bukan hal yang kecil. Petral sendiri mampu memenuhi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri lebih dari 50 persen.

"Harus hati-hati, karena peredaran atau perputaran uang yang ada di Petral sangat besar. Petral bisa membuka LC (letter of credit) di Singapura sampai dengan Rp60 triliun-Rp75 triliun," kata dia di Jakarta, seperti dituliskan Minggu (7/12/2014).

Jika nantinya Petral dipindahkan ke domestik, Komaidi ragu sindikasi perbankan nasional bakal mampu memberikan kredit sebesar itu. "Apalagi kalau satu perbankan, bukan tidak mampu dalam likuiditasnya. Tapi dalam ketentuan moneter memang tidak memungkinkan untuk memberikan kredit sebesar itu," ujar Komaidi. ■

Pemerintah Alokasikan Rp1 T untuk Listrik Perbatasan

Menteri ESDM Sudirman Said mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk membangun infrastruktur listrik di 47 daerah terluar Indonesia. Ia menargetkan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70 Agustus mendatang tidak ada daerah yang tidak dilewati sambungan listrik lagi. "Di HUT RI ke-70, jangan ada lagi 47 daerah pulau terluar dan perbatasan yang gelap, apalagi dengan negara tetangga. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa, jangan sampai negara tetangga terang benderang di kita gelap," tutupnya di Kantornya usai Rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), Kamis (18/12).

Sudirman menyebut anggaran tersebut berasal dari pengalihan subsidi BBM yang sudah dilakukan pemerintah.



"Dari pengalihan subsidi BBM ada penghematan anggaran, sebagian kita alokasikan untuk tambahan listrik untuk daerah-daerah terpencil. Ada 47 daerah terluar dan yang berbatasan dengan negara lain menjadi salah satu fokus kami untuk melistriki daerah tersebut," ujar Menteri ESDM Sudirman Said ditemui di Kantornya usai Rapat

dengan Dewan Energi Nasional (DEN), Kamis (18/12/2014).

Sudirman mengatakan dana Rp 1 triliun tahun depan untuk pembangunan pembangkit dan transmisi di daerah perbatasan. "Pendanaan disiapkan Rp 1 triliun, dengan total kapasitas listrik mencapai 60 megawatt," katanya. / Ismed Eka Kusuma

Pertamina Siapkan Rp13T untuk Akuisisi Blok Migas



Pertamina berencana mengakuisisi sejumlah blok migas di luar negeri. "Kita sudah tetapkan beberapa lapangan minyak atau blok

yang akan diakuisisi tahun depan. Ada beberapa sumur di Malaysia ya," ungkap Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto ditemui di kantor BPH

Migas, Jakarta, Jumat (12/12).

Anggaran senilai 1,1 miliar dolar sudah disiapkan Pertamina untuk memuluskan rencana ini. "Kita alokasikan US\$ 1,1 miliar," ucapnya.

Namun, nilai tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total rencana investasi Pertamina yang mencapai US\$ 7 miliar (Rp 84 triliun).

"Jadi dalam perencanaan, investasi US\$ 7 miliar untuk tahun depan. Itu kalau disetujui pemegang saham ya. Kira-kira kita punya capex (capital expenditure/belanja modal) sekitar US\$ 5 miliar, itu kebanyakan untuk pengembangan hulu migas seperti menambah sumur migas baru, pembangunan kilang minyak, dan upgrade kilang minyak. Kemudian US\$ 1,1 miliar untuk akuisisi blok di luar negeri, sisanya lain-lain," jelas Dwi.

/ Ismed Eka Kusuma



Pertamina Teken MoU Upgrading Lima Kilang Bersama Tiga Perusahaan Asing

PT Pertamina (Persero) hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan tiga mitra asing terkait Refining Development Master Plan (RDMP). Bersama para mitra, Pertamina berupaya melakukan upgrading dan modernisasi lima kilang Pertamina

Ketiga mitra itu yakni Saudi Aramco dari Saudi Arabia, Sinopec dari China dan JX Nippon Oil & Energy dari Jepang. Sementara kelima kilang yang akan ditingkatkan adalah kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, di Cilacap, Jawa Tengah, di Dumai, Riau, di Plaju, Sumatera Selatan, dan di Balongan, Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengolahan Pertamina Rahmad Hardadi dan Perwakilan dari tiga partner strategis yakni Presiden Aramco Ibrahim Al Buanain, VP JX Nippon Oil Michio Ikeda, serta General Manager of Sinopec Liao Xudong. Pembubuhan tanda tangan juga disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. "MoU ini dalam rangka

pengembangan kilang minyak dari 820 ribuan barel per hari untuk bisa jadi 1,6 juta barel per hari," kata Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto saat acara RDMP MoU Signing Ceremony di gedung utama Kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (10/12).

Ia berharap, pengembangan kelima kilang milik Pertamina itu, dapat memenuhi gap yang sekarang terjadi. "Dengan ini diharapkan bisa memenuhi gap yang sekarang ada. Karena ini akan selesai empat tahun ke depan. Ke depan, kita tetap butuh adanya kilang baru," ujar Dwi.

Proyek-proyek ini diharapkan dapat melipatgandakan kapasitas produksi kilang sekaligus menjaga lingkungan melalui produksi bahan bakar pada euro IV (Spesifikasi untuk standar kandungan sulfur dan emisi).

Secara khusus, produksi bensin akan meningkat sebanyak 3,3 kali lipat dari 190.000 bph menjadi 630 bph, produksi diesel akan meningkat sebanyak 2,4 kali dari 320.000 bph menjadi 770.000 bph. / Ismed Eka Kusuma

Tiga Syarat Asing Bangun Kilang di Indonesia

Menteri Koordinator bidang Kamaritiman Indroyono Soesilo mengatakan perusahaan migas asing yang ingin berinvestasi membangun kilang minyak di Indonesia harus memenuhi tiga syarat.

"Pembangunan kilang akan dilakukan jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya ada tiga. Satu bawa bahan bakunya. Dua, bawa teknologinya. Tiga, bawa duitnya," ujarnya di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dikatakan pada periode 2014-2024, ada 380 perusahaan *production sharing contract* yang akan selesai. Dari jumlah itu, sudah tiga investor yang datang, Kuwait, Aramco, Iran. Negara OPEC hingga saat ini terus berusaha mempertahankan harga minyak agar tidak turun. Jika harga migas turun, maka investasi dieksplorasi akan turun juga."

Negara dalam OPEC berusaha menjaga agar minyak tidak turun terus. Pasalnya, sejak tahun 2014 kemarin Amerika tidak impor migas karena memanfaatkan oil shale," ujarnya.

Terkait kemampuan Indonesia mengolah minyak hingga 1 juta ton per day, Kemenko bidang Maritim mengaku sedang mengkajinya. Kemampuan 250 ribu ton dinilai sudah sulit dan tidak ekonomis.

/ Ismed Eka Kusuma



AIIB: HARAPAN BARU?

Oleh: Ismed Eka, Nicha, Dhanu Akbar

Ada sebuah keputusan sangat penting yang dibuat Jokowi diawal pemerintahannya. Yakni bergabung dengan Asian Infrastructure Asia Investment Bank (AIIB) yang diprakarsai China, sebelum pertemuan APEC Oktober 2013 lalu di Bali.

Dengan bergabung ke AIIB, Indonesia menjadi negara anggota yang ke 22. Padahal, Indonesia bersama Australia dan Korea Selatan semula menolak bergabung dengan AIIB. Banyak politisi, pengamat ekonomi dan hubungan internasional mengatakan penolakan Indonesia ini akibat tekanan kuat AS dan Jepang. Maklum, tangan AS dan Jepang lewat representasi pengaruh World Bank, IMF dan ADB, maupun kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia, akan terganggu dengan kehadiran AIIB.

Perlu diingat, saat China menawarkan modal awal USD50 miliar untuk pendirian AIIB, secara tidak langsung, Presiden Xi Jinping sebenarnya telah memberi sinyal bahwa AIIB akan menjadi pesaing terbesar ADB (baca: pengaruh Jepang.red) di negara-negara Asia.

“At a time when ADB faces a number of challenges, AIIB is the biggest... No matter if the new bank is formed in 2015 as planned or years from now, ADB needs to be prepared. There's real pressure,” kata seorang pejabat senior ADB seperti dituturkan ke *devex.com* (8/9)

Dalam skema geopolitik regional, berdirinya AIIB juga sangat penting. Saat SBY masih menjabat Presiden,

Indonesia telah aktif memprakarsai berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketika lima negara pendiri ASEAN yakni Indonesia, Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand bersedia menjadi anggota AIIB maka besar dugaan, Tiongkok lewat AIIB akan berperan aktif mendanai dan bergabung dalam Asean Infrastructure Fund (AIF). Bisa dibilang AIIB akan menjadi salah satu tulang punggung penting pembiayaan infrastruktur di ASEAN.

Namun di balik itu, sebenarnya ada isu yang jarang dibahas. Dan mungkin hampir tak dijadikan fokus pemberitaan. Ini soal agenda geopolitik besar Tiongkok untuk mengimbangi pengaruh tekanan geopolitik selama ekonomi dan politik kelompok negara *Trans-Pacific Partnership* di Asia Pasifik yang dimotori langsung oleh AS untuk mengimbangi dominasi

Tiongkok di kawasan Asia Pacific.

Pada Maret 2013 saat pertemuan 5th BRICS Summit di Durban, Afrika Selatan, China mendirikan New Development Bank (NDB). Anggotanya terdiri dari negara BRICS yakni China, Russia, India, Brasil dan



Afrika Selatan.

Tujuan dari pendirian NDB dan AIIB adalah mendukung secara finansial strategi dan *platform* geopolitik global China yakni *“The New Silk Road and Maritime Silk Road”* untuk melawan hegemoni

Pekerja mengerjakan pondasi pelabuhan Kalibaru di lepas pantai pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (27/11).



ekonomi dan politik AS dan Eropa.

Khusus untuk Indonesia plus ASEAN dan keinginan untuk “menyelesaikan” beberapa konflik yang berkembang di laut China Selatan secara damai. Terus terang, konflik laut China Selatan sangat

mengganggu fokus Tiongkok untuk mewujudkan agenda besar geopolitiknya itu. Kali ini, Tiongkok menggunakan terobosan dengan pendekatan *win-win solution* dengan mengedepankan proposal pembangunan mega infrastruktur

dalam koridor kepentingan geopolitiknya yakni Jalur Baru “*Maritime Silk Road*”.

Kepentingan Tiongkok itu beririsan dengan keinginan Jokowi untuk mengembangkan beberapa mega proyek infrastruktur untuk

memperkuat industri maritim di Indonesia dan kepentingan koneksi antar negara ASEAN dalam koridor Masyarakat Ekonomi Asean. Ada beberapa proyek besar untuk membangun dermaga besar (*deep-sea harbors*) di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur untuk mendukung itu. Itu belum beberapa pengembangan kawasan yang menunjang konsep Jokowi soal Tol Laut.

Di KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar 12 November 2014 lalu Jokowi sudah menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Laut China Selatan harus segera diselesaikan agar *Master Plan on ASEAN Connectivity* bisa terlaksana dengan baik. Dalam *masterplan* itu ada kerjasama infrastruktur di bidang maritim, peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35-40 persen, meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari USD 2,2 triliun menjadi USD 4,4 triliun pada tahun 2030, serta mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6% menjadi 9,3%.

Itu konteks kepentingan Jokowi ketika memutuskan untuk bekerjasama dengan AIIB (atau mungkin kelak bergabung dengan NDB?).

Bawa secara ekonomis ada alasan bahwa kehadiran AIIB penting untuk menutup *gap* kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Asia yang tak mampu di berikan oleh ADB dan World Bank. Itu juga dibenarkan.

Namun ada alasan penting lain yang harus dipertimbangkan. Bawa besar dugaan, skema pinjaman yang dipakai AIIB tidak lagi menyaraskan secara mutlak “kepatuhan” melaksanakan agenda-agenda ideologis (yang dalam bahasa World Bank, IMF atau ADB disebut kesepakatan global) lain, di balik pemberian pinjaman seperti yang lazim dipersyaratkan oleh IMF, World Bank dan ADB ketika memberi pinjaman. Di samping itu, keberadaan AIIB akan mendorong World Bank, IMF dan ADB untuk



melakukan reformasi agar bisa “diterima” oleh negara-negara di Asia juga.

Namun, yang harus dikontrol terus oleh DPR, bahwa masuknya Indonesia ke AIIB harus dipastikan yang mendapat keuntungan paling besar adalah rakyat Indonesia. Bukan China, bukan negara asing, bukan pengusaha dan bukan politisi.

“Kalau sudah bergabung dengan AIIB, maka pemerintah harus mendorong *governance* AIIB yang setara dan transparan. Ini cara agar negara tidak dijajah melalui utang,” kata Direktur Koalisi Anti Utang (KUA) Dani Setiawan beberapa saat lalu.

Pernyataan Dani itulah yang seharusnya didorong dan dijadikan visi penting dibalik setiap kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk dengan bergabung ke AIIB.

Ekspansi Tiongkok ke Indonesia

Pada rangkaian kegiatan APEC 2014 di Beijing, ada 12 nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha Indonesia dan China ditandatangi yang diinisiasi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Acara tersebut dihadiri 170 pengusaha Indonesia dan 150 pengusaha China menghasilkan kerja sama di sektor logistik, transportasi, pertambangan, energi, industri gula tebu dan kawasan industri.

Di sektor logistik, MoU antara PT Zadasa dengan Shen Zhen Tian He Wei Hang, PT Resteel Industry dengan China Railway Construction, PT Eka Sampoerna Sukses dengan Fujian Yinhai Group dengan investasi mencapai 1,3 juta dolar AS, Maspion Group dengan Shining Resources dengan total investasi mencapai 100 juta dolar AS untuk pembangunan smelter.

Kemudian Global Sukses Group, Cahaya Sukses International dengan Fujian Tian Mao dengan investasi 1,5 juta dolar AS, PT Wijaya Infrastruktur Indonesia dengan Golden Mega International Holdings mencapai 120 juta dolar AS, PT Integral Mining Nusantara dengan Jiangsu Wei-Wei Mining mencapai 775 juta dolar AS dan PT Sinar Sukses Mandiri dengan Zhong Ji Hao



mencapai 306 juta dolar AS.

Kerja sama lainnya adalah antara PT Indonesia Energy Prima dengan SDIC International Trade mencapai 350 juta dolar AS, PT Kayan Hydro Energy dengan Shanghai Electric Power mencapai 17,8 miliar dolar AS, PT Adaro Power dengan China Shenhua Overseas serta PT MAESA Optima Mineral dengan Vansun Holding Group.

Data BKPM periode 2010 hingga kuartal ke-3 2014 mencatat investasi China secara nominal bukan yang terbesar. Namun dari jumlah proyek, investasi China terus meningkat dari 113 tahun 2010, jadi 160 proyek pada 2011. Bahkan tahun 2012 meningkat lagi jadi 190, lalu 2012 melonjak jadi 411 proyek. Hingga kuartal ke-3 2014, jumlah proyek investasi China di Indonesia telah mencapai 435 dengan nilai mencapai USD328,7 Juta.

Hongkong pada 2010 telah menginvestasikan USD566,1 juta di 62 proyek, sedangkan pada kuartal ketiga 2014 investasi sudah mencapai USD498,9 Juta yang tersebar di 219 proyek.

Beberapa investor asing memang sudah agresif menanamkan

modalnya di Indonesia. China yang telah mengalami *bubble property* mengembangkan modalnya ke luar negeri, salah satunya Indonesia dengan potensi profit yang tinggi.

China Sonangol Land diketahui mengakuisisi EX Plaza Indonesia, di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, kawasan tersebut bakal dikonversi menjadi pengembangan multifungsi EX Building yang mencakup perkantoran, ruang ritel, kondominium, dan service apartment. Perusahaan ini juga bermitra dengan Sampoerna Group membangun dua menara baru Sampoerna Strategic Square dengan kapasitas area sewa seluas 234.000 meter persegi. Kedua gedung ini berdiri di atas lahan seluas 34.735 meter persegi.

Selain itu, Managing Director Corporate Strategy & Services Sinar Mas Land, Ishak Chandra, Hongkong Land Holdings Ltd akan mengembangkan proyek residensial di BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan ini akan mengembangkan 68 hektar

yang dibeli dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Lewat anak usaha PT Bumi Parama Wisesa, Sinarmas menggarap proyek Nava Park. Ini adalah proyek properti terpadu yang ada hunian tapak hingga apartemen.

Head of Marketing dan Support Service Bumi Parama Wisesa, Yanto Suryawan mengatakan proyek dengan luas total 68 hektare (ha) tersebut dikembangkan secara bertahap mulai pertengahan 2014. Di proyek ini, Sinarmas menggenggam kepemilikan 51% dan sisanya Hongkong Land. Kebutuhan investasi untuk keseluruhan proyek berkisar antara Rp4 triliun-Rp5 triliun.

“Hongkong Land memiliki pengalaman membangun vertical residence. Kami membangun hunian vertikal dalam jumlah yang sangat banyak, 3.000-4.000 unit. NavaPark ini dikembangkan oleh dua pengembang besar dengan konsep mix residential,” ujarnya (28/10).

Selain dengan Sinar Mas Land, Hongkong Land juga menjalin aliansi strategis dengan PT Jakarta Land. Hasil kerja sama ini berupa kepemilikan properti premium di lokasi utama yakni Wisma Metropolitan I, Wisma Metropolitan II, World Trade Centre I, dan World Trade Centre II.

Bersama Central Cipta Murdaya Group, Hongkong Land berencana membangun CBD Kemayoran di Jakarta Pusat, di atas lahan seluas 44 hektar. Proyek ini digadang-gadang membutuhkan investasi senilai Rp80 triliun.

Pengamat ekonomi dari IPB, Suhana mengatakan derasnya investasi Tiongkok menunjukkan ada indikasi perubahan geopolitik Indonesia dari Barat ke Asia (China). Namun menurutnya yang lebih penting dan harus dikritisi adalah penikmat dari investasi tersebut.

“Menurut saya pasti ada perubahan geopolitik dari Barat ke Asia. Tapi yang perlu dikritisi adalah siapa yang menikmati dari investasi ini, masyarakat atau investor,” ujar Suhana. ■

Pemerintah Ganti Rugi Korban Lapindo

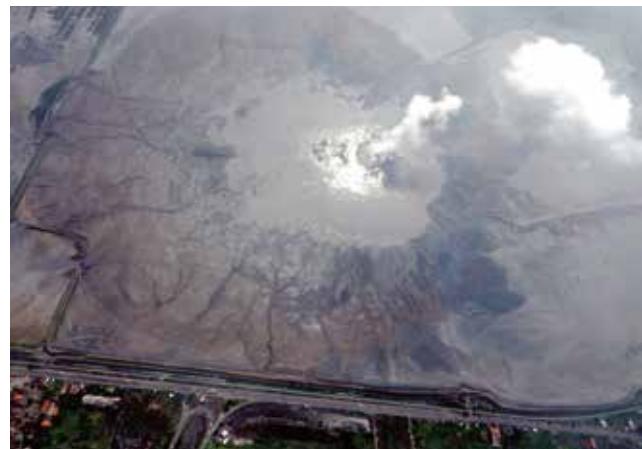
Pemerintah memutuskan membayar ganti rugi sebesar Rp781 miliar kepada korban semburan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Keputusan tersebut diambil setelah PT Minarak Lapindo Jaya sepakat menjaminkan asset tanah korban yang sudah diganti sebesar Rp 3,03 triliun. "Sekarang Minarak tidak punya uang, dipailitkan pun tidak ada uangnya. Pemerintah ingin membantu masyarakat supaya jangan terlalu lama menderita, maka dari itu pemerintah menalanginya," kata Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (19/12).

Total ganti rugi kewajiban Lapindo, menurut Sofyan, karena lahan yang terdampak lumpur sebesar Rp3,8 triliun. Sementara pihak Minarak Lapindo, kata Sofyan, telah menuntaskan pembayaran ganti rugi sekitar Rp3,03 triliun.

Dia mengatakan dana talangan itu dijamin Lapindo dengan sertifikat seluruh lahan terendam lumpur. Maka dari itu, Sofyan yakin Lapindo akan mengganti dana talangan itu, karena sertifikat jaminannya bernilai lebih dari Rp3 triliun.

Pemerintah memberikan waktu empat tahun bagi Minarak Lapindo untuk mengganti dana talangan tersebut."Jadi kayak pinjamin uang tapi jaminannya seluruh aset mereka," ujarnya.

Dana talangan itu, kata Sofyan, akan diambil dari APBN Perubahan 2015, yang akan diajukan ke DPR



pada Januari 2015. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan selesainya permasalahan ganti rugi itu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat segera bekerja untuk mencegah meluasnya dampak di luar peta terdampak. / Ismed Eka Kusuma

Pemerintah Pangkas Setoran Deviden BUMN



Pemerintah memutuskan untuk memangkas setoran deviden BUMN. Kebijakan yang diambil oleh Menteri BUMN Rini Soemarno ini didukung oleh Presiden Joko Widodo. "Sudah bertahun-tahun BUMN kita ini dibebani oleh dividen, sehingga mereka tidak bisa berkembang. Kalau dividennya tidak diambil, mereka bisa mengembangkan bisa ekspansi kemana-mana," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi mengaku pemerintahannya tak akan lagi bergantung dari setoran BUMN. Pada APBN 2015, setoran dividen BUMN ditetapkan Rp 44 triliun. Padahal, sejumlah perusahaan plat merah tengah dililit hutang.

Di APBN-P 2015 yang tengah disusun pemerintah, Jokowi mengaku pemerintah akan lebih menitikberatkan penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak dan bukan pajak. "Jadi biar berkembang, biarkan dividen-dividen itu dipakai

untuk berkembang lebih besar lagi, asal untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah sudah memberikan target khusus untuk 10 BUMN besar. Ke-10 BUMN tersebut yaitu PT Semen Indonesia Tbk dengan dividen dari 45 persen menjadi 70 persen, PT Pelindo II dari 35 persen menjadi 40 persen, PT Pelindo III dari 35 persen menjadi 40 persen, PT Hutama Karya dari awalnya tak dipungut dividen menjadi 30 persen, PT Bank Mandiri Tbk dari 27,5 persen menjadi 30 persen.

Selanjutnya PT Bank Negara Indonesia Tbk dari 25 persen menjadi 30 persen, PT Bank Tabungan Negara Tbk dari 20 persen menjadi 30 persen, PT Perkebunan Nusantara III dari 30 persen menjadi 35 persen, PT Perkebunan Nusantara IV dari 31 persen menjadi 35 persen dan PT Jasa Raharja dari 55 persen menjadi 60 persen.

/ Ismed Eka Kusuma

Amankan Rupiah, BI Gelontorkan RP1,7 T



Bank Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk investasi pasar mejaga nilai tukar rupiah sejak Senin (15/12) hingga Selasa. Kebijakan ini dimulai setelah pada pembukaan perdagangan Senin lalu rupiah terus merosot hamper menyentuh Rp13.000. "Anda bisa lihat dari pergerakannya BI, dalam beberapa hari ini intervensi di valasnya lebih besar. Intinya BI melihat pelemahan dalam beberapa hari terakhir ini terlalu berlebihan. Makanya kita intervensi lebih banyak dan (dolar) sudah kembali ke sekitar Rp 12.600," ujar Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12).

Salah satu upaya intervensi BI adalah di pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang pemerintah. BI, menurut Perry, melakukan pembelian SBN cukup besar dalam 2 hari terakhir.

"Kita kemarin beli banyak, Rp 1,5 triliun dalam 1 hari. Hari ini, dari pagi tadi kita beli hampir Rp 200 miliar tapi sudah nggak ada lagi," ungkapnya.

Pembelian SBN sampai Rp 1,5 triliun dalam sehari, lanjut Perry, bisa dibilang luar biasa. "Kemarin memang ada penjualan SBN besar, makanya BI juga belinya besar. Kami beli Rp 1,5 triliun," katanya. / Ismed Eka Kusuma

Indonesia Impor Raw Sugar 600 Ribu Ton

Pemerintah telah memberikan izin impor kepada pabrik gula rafinasi untuk 600 ribu ton raw sugar. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan keluarnya izin impor raw sugar sebesar 600.000 ton maka industri makanan minuman bisa produksi tanpa khawatir kekurangan bahan baku. "Dengan jumlah yang dikeluarkan ini kita bisa sedikit bernafas lega. Industri mamin bisa tetap tumbuh," kata Adhi dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Adhi mengatakan, impor sebanyak 600.000 ton raw sugar atau gula mentah tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri pada triwulan I-2015. Sementara kebutuhan raw sugar sepanjang tahun depan diperkirakan mencapai 3,2 juta ton. "Kenapa kita butuh, poin yang sangat penting sekali bahwa industri mamin sangat butuh gula rafinasi karena gula ini harus



memenuhi spesifikasi teknis untuk mamin," tuturnya.

Adhi menyampaikan, permohonan impor tambahan akan dilakukan secara bertahap. Setelah impor 600.000 ton disetujui untuk memenuhi kebutuhan di bulan Januari hingga Maret 2015, impor kembali akan dilakukan untuk kebutuhan bulan April hingga Juni sebanyak 1 juta ton. Pertimbangannya, produksi makanan dan minuman pada periode tersebut akan meningkat karena menghadapi Puasa dan Hari Raya Lebaran, karena tingkat konsumsi masyarakat pun meningkat. "Jadi peak-nya itu di Juni, kami meminta 1 juta ton untuk April sampai Juni," tuturnya. / Ismed Eka Kusuma

Menteri BUMN Ingin Jual Kantornya



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Salah satu alasan Rini adalah gedung yang saat ini dipakai terlalu besar untuk karyawannya yang hanya 250 orang. "Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja

sudah cukup sehingga ya dijual saja kalau gitu," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Selain itu gedung 21 lantai tersebut dinilai tidak efisien dalam penggunaan listrik. Pasalnya sistem pendingin ruangan gedung tersebut terpusat. "Mereka curhat kalau kerja kepanasan dan sampai keringatan karena AC-nya mati. Kalau mau dihidupin, (AC di) semua gedung harus hidup, kan mubazir," kata dia.

Rini mengaku berencana menjual gedung kementeriannya untuk tujuan efisiensi biaya operasi kementerian. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku akan menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor, tetapi mengatakan belum memikirkan alternatif pengganti kantornya tersebut. / Ismed Eka Kusuma

CENGKERAMAN CINA DI INDONESIA

Oleh: Ismed Eka, Nicha, Dhanu Akbar

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) yang digelar di Beijing, Tiongkok, pekan kedua November 2014, menjadi awal perjalanan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Di Negeri Tirai Bambu tersebut, Presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2014 melalui pengusaha keturunan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menekan kerjasama berbagai bidang.

Dari logistik, konstruksi, transportasi, smelter, infrastruktur, pertambangan/energi, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kawasan industri, hingga bidang potensial yang merupakan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia lainnya.

Mereka digandeng untuk bermitra strategis dengan Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang sebagian besar dimiliki pengusaha keturunan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Nilainya ditaksir mencapai USD 27,4 miliar.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, dalam pertemuan itu Presiden mengajak serta 170-an pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin. Dalam sesi acara Forum Bisnis KTT APEC, ke-170 pengusaha ini bersama 150 pengusaha Tiongkok menekan 12 Memorandum of Understanding (MoU).

Rincian perusahaan, berikut besaran kerjasamanya antara lain PT Zadasa Internasional dengan Shen Zhen Tian He Wei Hang senilai investasi 5,510 juta dolar AS, PT Resteel Industry dengan

China Railway Construction, PT Eka Sampoerna Sukses dengan Fujian Yinhai Group senilai 3 juta dolar AS, Maspion Group dengan Shining Resources senilai 100 juta dolar AS.

PT Global Sukses Group dan Cahaya Sukses International dengan Fujian Tian Mao senilai 1,5 juta dolar AS, PT Wijaya Infrastruktur Indonesia dengan Golden Mega International Holdings senilai 120 juta dolar AS, PT Integral Mining Nusantara dengan Jiangsu Wei-Wei Mining senilai 775 juta dolar AS, PT Sinar Sukses Mandiri dengan Zhong Ji Hao senilai 306 juta dolar AS.

Lalu, PT Indonesia Energy Prima dengan SDIC International Trade senilai 350 juta dolar AS, PT Kayan Hydro Energy dengan Shanghai Electric Power senilai 17,8 miliar dolar AS dan PT Adaro Power dengan China Shenhua Overseas serta PT Maesa Optimalah Mineral dengan Vansun Asean Group.

Keinginan Cina membangun Jalan Sutera Maritim Abad 21 di Indonesia seperti diungkapkan Suryo ini dipertegas Ketua MPR Cina Chen Xiaoguang usai bertemu dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Selasa (9/12).

Jalur Sutera Maritim Abad 21 Cina ini merupakan jalur perdagangan kuno yang sejalan dengan konsep Tol Laut Jokowi. Rute tata niaga dan energi ini dipelopori Cina untuk menghubungkan Eropa ke Asia Tengah dan Asia Timur serta Afrika ke Asia Selatan dan Asia Timur.

Kedatangan ini diakui Chen guna menindaklanjuti kesepakatan yang telah diteken kedua negara



Rapimnas Kadin. Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto (kedua kiri), Mantan Menteri Perindustrian M. S. Hidayat (kanan), Ketua Kadin Golf Club Soeharsojo berbincang seusai membuka turnamen golf di Jakarta, Minggu (7/12).

saat KTT APEC. Cina mempunyai kepentingan terhadap Indonesia, khususnya bagi kemajuan Indo-Cina.

“Kami tahu, Tiongkok memainkan



peranan penting dalam hubungan kedua negara. Kami mengharapkan kedua negara bisa berhubungan secara politik, ekonomi dan sosial,” kata Chen.

Sejak menyepakali sejumlah kerjasama besar dengan pemerintah dan pengusaha Cina, pemerintah langsung membuka pintu lebar untuk investor. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mempertegas komitmen itu. “Tiongkok, ekonomi terbesar kedua

di dunia, dan Indonesia itu pintunya Tiongkok,” kata Indroyono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/11).

Kerjasama antara Indonesia-China pada awal pemerintahan baru ini sempat membuat Jokowi di kritik menjual Negara. Ia menjawab kritik tersebut. Di hadapan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jokowi menjawab

kritik tersebut.

Jokowi mengaku belajar dari negara Tiongkok. Di negara yang dulunya komunis dan sangat tertutup dengan negara lain tersebut, Tiongkok membuka lebar keran investasi. Hasilnya, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni 11-12 persen.

“Saya bertanya saat ketemu dengan wakil PKC, Partai Komunis China. Pada saat mereka membuka



negaranya besar-besaran untuk investasi asing, apakah mereka tidak takut penguasaan ekonomi dikuasai pihak asing? Ini masalah ideologi loh,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11)

“Jawabannya saat itu, tidak sama sekali tebersit di otak mereka (Partai Komunis China) bahwa investasi menguasai perekonomiannya karena barang-barangnya ada di negara mereka,” ucap Jokowi mengutip jawaban perwakilan dari PKC.

Penetrasi pengusaha China ke Indonesia memang sudah di presidiksikan sejak awal tahun 2012. Hal itu berawal dari janji Duta Besar China untuk Indonesia, Liu Jianchao, di Jakarta, Selasa (14/8).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencatat Januari

2014, jumlah investasi China ke Indonesia dari 2010 hingga kuartal keempat 2013 terus melonjak. Dibandingkan sesama investor asing, China menanamkan modal paling besar. Padahal hingga akhir kuartal keempat 2013, investasi China relatif lebih kecil. Jepang (4,7 miliar dollar AS) dan Singapura (4,7 miliar dollar AS) menempati peringkat pertama, dilanjutkan oleh AS (2,4 miliar dollar AS), dan Korea Selatan (2,2 miliar dollar AS). Jumlah FDI China akhir kuartal keempat 2013 itu baru 296,9 juta dollar AS.

Jumlah FDI (*foreign direct investment*) China ke Indonesia tampaknya menarik. Pada 2010, berdasarkan data BKPM, China menginvestasikan 173,6 juta dollar AS, diikuti senilai 128,2 juta dollar

AS pada tahun berikutnya, dan pada 2010 menjadi 141,0 dollar AS. Dengan kata lain, investasi FDI China mulai 2012 hingga 2013 meningkat 110,6 persen.

Saat ini investasi China sudah tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Oktober lalu misalnya Fuhai Group Limited, berencana membangun kawasan industri di Ujung Jabung, Jambi. Untuk merealisasikan rencananya, perusahaan itu akan mengucurkan dana US\$ 1,2 miliar, atau sekitar Rp 14,4 triliun, untuk tahap pertama.” Kami akan membangun kawasan industri yang di dalamnya terdapat pembangkit listrik, pelabuhan, smelter baja, hingga perkantoran. Minggu lalu tahap awal pembangunan sudah dimulai,”



Penambahan pembangkit. Pekerja mengoperasikan pipa instalasi hydrant Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lamajan, Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. Sampai tahun 2022, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana menambah kapasitas pembangkit sekitar 60 Gigawatt (GW). Dari total tersebut, sebanyak 6,5 GW berasal dari PLTA.

Antara PT. PLN (Persero) dengan Tiongkok Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor engineering procurement construction (EPC).

ujar Komisaris Utama Fuhai Group, Lizhi Zhao, di Jakarta, Senin (28/10).

Investasi China ke Indonesia ini sejalan dengan *roadmap* pembangunan pemerintahan baru yang dikonsep Ketua Pokja Energi Ari Soemarno. Salah satu di antaranya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pekan ini misalnya PT PLN (Persero) secara resmi menunjuk perusahaan Tiongkok Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor engineering procurement construction (EPC) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

Dalam proyek pembangkit berkapasitas 2 x 55 megawatt (MW)

ini, Sinohydro akan menggandeng PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) sebagai kontraktor bangunan dengan membentuk perusahaan patungan bernama Deng Xi.

"Jika pembangunan proyek PLTA bisa dimulai di awal 2015 dan berjalan sesuai perencanaan, maka diperkirakan awal 2019 PLTA Jatigede sudah dapat menyuplai pasokan listrik ke dalam sistem kelistrikan Jawa," kata Nur Pamudji usai penandatanganan kontrak pembangunan PLTA Jatigede bersama Deputy Managing Director Asia-Pasific Sinohydro Corporation Limited, Jumat (19/12).

Selain di Jawa Barat, investor China juga akan membangun PLTA, di daerah Nunukan, Kalimantan Utara. Ambros Tukan, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan mengatakan PLTA yang akan dibangun tersebut berada di Kecamatan Sembakung dengan kapasitas 4.000-5.000 Megawatt (MW) dan Kecamatan Lumbis dengan kapasitas 6.000 MW.

Menurut Ambros, salah satu perusahaan pembangkit listrik swasta asal Tiongkok sudah mulai mengurus perizinan guna mengejar target dapat mulai membangun pembangkit tersebut pada 2015.

"Kedua lokasi pembangunan

PLTA ini akan menggunakan Sungai Besar dengan kondisi arus air yang cukup tinggi sehingga tidak diragukan lagi pelayanannya nanti akan tersendat sebagaimana yang terjadi selama ini seringkali mengalami pemandaman," ujar Ambros dikutip dari situs Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin (15/12).

Pembangunan ini demi meningkatkan kapasitas listrik terpasang sepuluh tahun mendatang pemerintahan Jokowi, PLN, dan perusahaan swasta akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas total mencapai 6.300 Megawatt (MW). Untuk itu, pemerintah akan membangun 49 bendungan baru di sejumlah daerah. Selain itu saat ini pemerintah juga tengah menjajaki pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Tidak main-main, Pemerintah Tiongkok menyatakan siap menanamkan investasi sebesar US\$ 12,5 miliar untuk membangun PLTN 5 x 1.000 Megawatt (MW) di Indonesia jika izin dikeluarkan pemerintah.

"Lokasi pembangunan PLTN rencananya di wilayah Bangka Belitung. Perdana Menteri Tiongkok juga sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Jokowi di pertemuan APEC bulan lalu," ujar Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Yudi Utomo, Selasa (2/12) petang.

Dalam megaprojek tersebut, Yudi mengatakan Inuki akan bertindak sebagai pelaksana atau operator maintenance (OM) di PLTN yang rencananya akan dibangun menggunakan teknologi Tiongkok."Saya pastikan kalau 100 persen dana berasal dari Tiongkok. Tapi penggunaan produk dalam negeri (TKDN) lebih dari 70 persen," tuturnya. ■

Membina “Keakraban” TNI dan Militer Cina

Kerjasama pertahanan Indonesia-China yang semakin meningkat punya arti penting dan strategis bagi kedua negara. Indonesia harus pintar memposisikan diri di tengah persaingan China dan Amerika.

Oleh: Satrio Arismunandar



Hubungan Indonesia dengan tetangganya raksasa Asia, Cina, telah memasuki dimensi baru dengan makin eratnya kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hubungan diplomatik antara kedua negara memang sudah berlangsung cukup lama, 63 tahun.

Kebangkitan militer Cina, seiring dengan pertumbuhan ekonominya, tentu menjadi pertimbangan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat kerjasama militer dengan Cina.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, peningkatan kerjasama ini adalah demi menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada Februari 2014, Moeldoko yang tengah berkunjung ke Cina juga menegaskan, peningkatan kerjasama dengan Cina bisa terwujud sepanjang prinsip saling menghormati dan menjaga kesetaraan dijaga oleh kedua negara.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko melakukan salam komando dengan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) China Jenderal Fang Fenghui. Moeldoko berkunjung ke China pada Februari 2014 lalu.

Moeldoko telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Cina, Jenderal Fang Fenghui di Beijing. Indonesia dan Cina bersepakat menjadi mitra strategis pada 2005, dan berlanjut dengan penandatangan rencana aksi kemitraan strategis pada 2010, serta komunike bersama.

Hubungan RI-Cina ini semakin meningkat dengan kesepakatan pimpinan kedua negara untuk meningkatkan kemitraan strategis menjadi lebih komprehensif pada 2013.

Potensi Tindakan Agresif Cina

Dalam bidang pertahanan, RI dan Cina telah menyelesaikan Forum

Konsultasi Pertahanan pada 2007 dan kerjasama industri pertahanan pada 2011. Kerjasama itu berlanjut dalam bentuk saling kunjung pejabat tinggi militer, pertukaran perwira siswa di masing-masing angkatan, serta latihan bersama pasukan khusus antiteror, dan sebagainya.

Seiring dengan modernisasi militer Cina dan semakin tumbuhnya kekuatan militer negara adidaya baru tersebut, TNI merasa perlu menjaga hubungan baik dengan tetangga di utara. Perilaku militer Cina sendiri kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Potensi tindakan agresif militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan, yang dipersengketakan dengan sejumlah negara ASEAN, tentunya harus dicermati oleh TNI.

Tahun 2014, kapal-kapal perang Cina telah menggelar latihan pertama di dekat perairan Indonesia, persisnya di sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa dan dekat Pulau Christmas, milik Australia. Manuver ini menunjukkan militer Cina semakin percaya diri, di tengah sengketa territorial dengan sejumlah negara di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Indonesia memang tidak punya sengketa wilayah langsung dengan Cina. Namun, posisi geografis kepulauan Natuna milik Indonesia, yang kaya dengan sumberdaya migas, berhadapan langsung dengan perairan Laut Cina Selatan. Jadi, bisa saja konflik militer yang berpotensi pecah akibat sengketa wilayah di perairan tersebut berimbas ke Indonesia.

Selain itu, Indonesia adalah pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN, serta berkomitmen untuk menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara. Jika sejumlah negara anggota ASEAN terlibat konflik militer di Laut Cina Selatan akibat sengketa wilayah dengan Cina, kestabilan akan terganggu dan Indonesia tentu tak bisa berpangku tangan.

Indonesia diharapkan bisa berperan, dengan mengajukan opsi-opsi menuju solusi damai atau setidaknya peredaan ketegangan.

Perluasan Pengaruh Cina

Bagi Cina sendiri, Indonesia dengan 250 juta penduduknya dan ekonomi yang terus bertumbuh, jelas pasar yang penting bagi produk-produk Cina. Indonesia juga perlu digaet sebagai mitra untuk “mengamankan kawasan lambung selatan” Cina.

Cina sedang beradu pengaruh dengan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik, dan dalam konteks itu Indonesia telah menjadi ajang persaingan pengaruh antara kedua negara adidaya. Karena itu, Indonesia harus pintar-pintar memposisikan diri. Syukur-syukur bisa menarik manfaat dari persaingan antara Cina dan AS tersebut.

Untuk upaya perluasan pengaruh, Menteri Pertahanan Cina, Jenderal Chang Wanquan, mengunjungi Indonesia pada 16 Desember 2013. Ia menawarkan beberapa kerjasama konkret di bidang militer dan pendidikan dengan Indonesia, meliputi bidang militer darat, laut, dan udara. Kerjasama di darat berupa latihan bersama Kopassus, yang akan digelar rutin. Terlihat di sini ada hubungan dekat antara pasukan khusus Cina dan Indonesia.

Untuk kerjasama di bidang laut, kedua militer telah berlatih bersama dengan nama latihan Komodo dan digelar di Laut Cina Selatan. Lokasi latihan itu tidak menyentuh wilayah internasionalnya, namun hanya berlatih di wilayah RI saja. Di bidang militer udara, Cina mengaku siap mendidik para pilot TNI untuk berlatih menggunakan simulator pesawat Sukhoi. Saat ini TNI-AU memang menggunakan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia, sebagai pesawat tempur andalan. Penggunaan simulator sengaja dipilih, karena apabila berlatih dengan pesawat asli bisa memakan biaya tinggi.

Hal yang menarik dalam kerjasama Indonesia-Cina adalah tentang industri pertahanan. Untuk menghindarkan ketergantungan kepada negara lain dalam penuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Indonesia saat ini

melakukan kebijakan diversifikasi. Dalam kaitan itulah, Indonesia bersikap terbuka menerima kerjasama industri pertahanan dengan Cina berdasarkan konsep transfer teknologi, dalam rangka membangun industri pertahanan dalam negeri.

Kerjasama Pembuatan Rudal

Kedua negara telah sepakat melakukan transfer teknologi dari Cina, dalam produksi rudal antikapal C-705 untuk TNI-AL. Saat ini TNI-AL sudah menggunakan rudal-rudal buatan Cina di kapal-kapal perangnya. Kesepakatan pembuatan rudal tersebut telah dibahas pada 2012 dan akan direalisasikan oleh Kementerian Pertahanan RI dan Badan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri Pertahanan Negara (SASTIND) Cina.

Rudal C-705 merupakan pengembangan lebih lanjut dari rudal C-704, yang masuk dalam seri rudal C-70X. Namun, dibandingkan seri-seri C-70X terdahulu, C-705 lebih baik dalam proporsi (mesin pendorong), hulu ledak, dan sistem pemandunya. Mesin rudal C-704 sebelumnya telah diganti dengan mesin lebih besar, ditambah penambahan mesin turbojet dan *retractable wing* (sayap tarik-masuk), yang meningkatkan jangkauan hingga 140 km. Desain modular dan mesin baru C-705 juga memungkinkan peningkatan lagi jangkauan rudal hingga 170 km.

Bobot hulu ledak C-705 adalah 110 kg, lebih kecil dari hulu ledak C-704 yang mencapai 130 kg. Namun, adaptasi dari hulu ledak HVTD-H *high explosive directional* akan menjadikan C-705 efektif dalam menghancurkan sasaran (kapal musuh) yang berukuran hingga 1.500 ton atau lebih. C-705 memiliki bobot 320 kg, ketinggian jelajah 12,15 meter (terendah), dan dapat diluncurkan



dari kapal perang, kendaraan darat, dan pesawat dengan tingkat “daya bunuh” lebih dari 95,7 persen.

Namun masih ada sedikit kendala yang dirasakan Kementerian Pertahanan RI tentang aturan transfer teknologi di Cina yang didasarkan hak cipta intelektual. Indonesia harus membayar *special fee* untuk transfer teknologi ini dan kedua negara belum mencapai kata sepakat.

Indonesia berharap untuk bisa memproduksi versi sendiri C-705 untuk dipasarkan ke luar negeri. Namun Cina menolak menyerahkan teknologi C-705 sepenuhnya ke Indonesia, karena masih banyak negara lain yang mencari atau membeli senjata canggih dari Cina.

Kerjasama rudal C-705 itu sendiri sangat strategis bagi Indonesia, karena bisa menjadi batu pijakan untuk mengembangkan kemampuan rudal jelajah RX-420, buatan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional). RX-420 ditargetkan memiliki jangkauan 300 km lebih dan sudah diuji coba beberapa kali, namun masih kurang dalam hal keakuratan mencapai sasaran secara presisi.

Jika teknologi rudal jelajah telah dimiliki pakar rudal Indonesia, munculnya rudal RX-420 versi militer pastilah akan mengentarkan negara-negara tetangga. Negara tetangga yang berniat mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia akan berpikir puluhan kali, jika pertahanan rudal Indonesia bisa dikembangkan secara optimal. ■

(Dilah dari berbagai sumber)

Ketika Sang Naga Mengasah Cakarnya

Cina terus-menerus memodernisasikan kekuatan militernya. Pembangunan militer Cina yang dinilai semakin agresif ini mencemaskan negara-negara tetangga, khususnya yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing.

Oleh: Satrio Arismunandar

Salah satu isu hangat yang terkait dengan bangkitnya Cina sebagai negara adidaya baru dunia, yang menggerogoti peran dan pengaruh negara adidaya Amerika Serikat, adalah modernisasi angkatan bersenjata Cina. Seiring dengan kemajuan ekonominya yang fenomenal, masuk akal jika Cina juga memperkuat militernya secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pengembangan kekuatan militer lewat modernisasi merupakan sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan strategis Cina. Termasuk kebutuhan Cina atas berbagai sumberdaya, yang menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Terlihat jelas Cina sedang membangun dan mengembangkan kapabilitas militer yang berdampak melampaui kawasan Asia. Bahkan perkembangan terakhir mengindikasikan, Cina sedang menyiapkan kekuatan yang dimaksudkan untuk menantang dan menangkal AS.

Pemerintah Cina secara resmi menyatakan, negeri tirai bambu itu meningkatkan belanja militernya 12,2 persen pada tahun 2014, jadi 808,23 miliar yuan (setara 131,57 miliar dollar AS). Sebagian anggaran itu digunakan untuk meningkatkan pertahanan pantai dan udara, dan mengembangkan persenjataan yang berteknologi lebih canggih.

Angkatan Bersenjata Cina, yang populer dengan sebutan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA (People's Liberation Army), saat ini berkekuatan 2,3 juta orang.

Peningkatan anggaran pertahanan Cina ini nyaris berkesinambungan sebesar dua digit tiap tahun, selama dua dasawarsa terakhir.

Teknologi Baru dan Canggih

Perdana Menteri Li Keqiang dalam acara pembukaan pertemuan tahunan parlemen Cina mengatakan, "Kita secara komprehensif akan mengembangkan hakikat revolusioner angkatan bersenjata Cina, lebih jauh memodernisasikannya, dan memperbarui kinerjanya, serta terus meningkatkan kapabilitas tempur dan deteren dalam zaman informasi."

Ditambahkan oleh Li, Cina akan memperkuat riset dalam pertahanan nasional, serta pengembangan senjata dan perlengkapan militer berteknologi baru dan canggih. Juga, meningkatkan pertahanan daerah perbatasan, pantai, dan udara.

Belanja militer Cina saat ini sudah menjadi nomor dua terbesar di dunia, hanya kalah oleh Amerika Serikat. Anggaran sebesar itu memungkinkan Beijing menciptakan kekuatan militer modern. Militer yang sanggup memproyeksikan keuatannya jauh ke dalam perairan yang disengketakan antara Cina dan sejumlah negara lain di Laut Cina Selatan dan Timur.

Bagaimanapun, banyak dari belanja militer Cina dilakukan di luar anggaran yang diumumkan secara resmi. Sehingga sejumlah pakar memperkirakan, angka belanja militer Cina sebenarnya mendekati 200 miliar dollar AS. Sebagai perbandingan, anggaran basis



Departemen Pertahanan AS untuk tahun fiskal 2014 adalah 526,8 miliar dollar AS.

Sebagai bagian dari strategi pusat ke Asia, yaitu pada saat AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu, Cina justru sibuk membangun kapal selam, kapal permukaan, dan rudal balistik antikapal. Cina bahkan telah menguji teknologi persenjataan yang sedang berkembang, yang diharapkan mampu mencegat dan menghancurkan rudal musuh di udara.

Cina juga melakukan uji terbang perdana untuk jet tempur siluman pada 2011, serta meluncurkan kapal induk hasil peremajaan ke laut. Namun, meski saat ini tengah berlangsung berbagai langkah modernisasi militer Cina ini, para pakar menilai, militer Cina masih butuh beberapa puluh tahun untuk bisa menandingi angkatan bersenjata AS.

Diminta Lebih Transparan

David Helvey, Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Asia Timur, mengatakan pada acara dengar pendapat dengan Senat AS bahwa Pentagon berusaha membangun hubungan yang "sehat" dengan militer



Cina. Namun ia menambahkan, Beijing perlu lebih transparan tentang pembangunan kekuatan militerinya.

“Kami tetap prihatin tentang kurangnya transparansi dalam pertumbuhan militer Cina dan perlakunya yang semakin asertif dalam matra maritim,” ujar Helyve.

Cina sendiri berulangkali menegaskan, dunia tidak perlu cemas atas pembelanjaan militer Cina. Karena, menurut Beijing, pembelanjaan itu untuk tujuan-tujuan defensif yang sah. Meski demikian, tetangga-tetangga Cina merasa was-was tentang pengembangan militer Cina. Kenaikan anggaran pertahanan Cina sebesar dua digit tahun 2014 ini terbukti makin meresahkan negara-negara tetangga.

Saat ini Cina memang terlibat sengketa wilayah dengan Jepang, atas kepemilikan sejumlah pulau cadas tak berpenghuni di Laut Cina Timur. Beijing juga mengklaim 90 persen dari 3,5 juta kilometer persegi wilayah Laut Cina Selatan, yang diyakini mengandung cadangan minyak dan gas yang sangat kaya.

Klaim Cina ini tumpang tindih

dengan klaim wilayah dari sejumlah negara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Semua sama-sama mengklaim sebagian dari perairan luas tersebut. AS pun menyatakan, prihatin. Klaim-klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan itu dinilai Gedung Putih sebagai upaya Cina meraih kontrol atas lautan-lautan di kawasan Asia-Pasifik.

Laporan Tahunan Departemen Pertahanan AS ke Kongres tentang perkembangan militer Cina 2013 menyatakan, ada unsur signifikan dalam program modernisasi militer Cina yang didedikasikan pada jajaran rudal balistik. Memang, Cina memiliki program rudal balistik yang paling aktif dan terbesar di dunia.

Kapal Selam dengan Rudal Nuklir

Cina sedang membangun jajaran yang beragam dari kapabilitas rudal ofensif, termasuk SLBM (rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam). Pentagon melaporkan, Cina saat ini memiliki tiga kapal selam dengan rudal nuklir (SSBN) yang operasional. Cina bisa menambah jumlah itu dengan lima SSBN pada akhir dasawarsa mendatang, sebelum ia memulai generasi-berikut SSBN. Masing-masing kapal selam itu dilengkapi dengan 12 tabung peluncur rudal.

Cina juga akan segera berpatroli dengan sebuah SLBM baru dari area operasi yang berlokasi dekat pantai Cina. Sehingga untuk pertama kalinya memungkinkan SSBN Cina menargetkan bagian-bagian dari wilayah AS.

Jajaran rudal balistik antarbenua (ICBM) Cina juga selalu mengalami pengembangan dan investasi. Cina bukan hanya membuat investasi pada ICBM-ICBM baru, namun juga memastikan ICBM tersebut mampu membawa banyak wahana hulu ledak

nuklir, yang masing-masing bisa mencari sasaran secara independen.

Modernisasi militer Cina merupakan bagian integral dari ambisi negara itu untuk mengembangkan kekuatan ekonomi dan politik globalnya.

Sebagai kekuatan ekonomi nomor dua di dunia – yang diperkirakan menjadi ekonomi terbesar di dunia pada 2021 – Cina memandang pertumbuhan yang berkesinambungan dan kemakmurannya terkait erat dengan kemampuannya untuk mengamankan sumberdaya energi dan mineral, memperluas perdagangan, dan mengakses pasar-pasar baru.

Sejak menjalankan modernisasi terkini pada akhir 1990-an, Cina memperagakan kecenderungan provokatif berkala, untuk menantang pengaturan-pengaturan keamanan yang telah ada, begitu juga perbatasan-perbatasan maritim, khususnya di Laut Cina Selatan dan Timur.

Namun, lebih jauh, Cina kadang-kadang juga dinilai bisa menjadi kekuatan pendestabilisasi melampaui kawasannya. Terutama, atas ekspor senjata dan teknologi ke negara-negara yang berada di bawah sanksi Barat, seperti Iran.

Cina jelas beraspirasi untuk menegakkan diri sebagai kekuatan geopolitik, ekonomi, dan militer terkemuka di Asia Timur. Cina pada akhirnya meluaskan kemampuannya untuk mempengaruhi kondisi-kondisi ekonomi dan politik, membentuk kompetisi-kompetisi global, dan mengamankan jalur komunikasi laut kritis pada skala geografis yang jauh lebih ambisius, dari Timur Tengah ke Pasifik bagian timur.

Pengejaran dan pencapaian Cina terhadap tujuan ini menjadi perhatian dan keprihatinan global. Hal itu bukan hanya bagi industri pertahanan dan dirgantara global dan komunitas-komunitas keamanan di Asia, Amerika Utara, dan tempat-tempat lain manapun. Tapi juga bagi semua perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis internasional. ▀

(Dilolah dari berbagai sumber)

Brutalitas CIA

Oleh: Wahyu Romadhoni

Dua tangannya terikat tambang dan ditarik dari dua sisi berlawanan. Itu terjadi di sebuah ruangan minim cahaya di Negara antah berantah. Wajah Ammar, nama lelaki itu penuh luka. Seorang interogator melontarkan sejumlah pertanyaan dengan nada tinggi. Tapi Ammar memilih membisu.

“Kapan terakhir kau bertemu Osama bin Laden... kapan...kapan,” ujar integrator Central Intelligence Agency (CIA) berbadan tegap itu.

Ammar

tidak bergeming. Sedetik kemudian seorang berbadan tegap dengan *saibo* menutup muka menarik tubuh Ammar. Dipaksanya dia terlentang di selembar matras tipis.

Selembat handuk dipasang paksa menutup muka Ammar. Sang interogator kemudian menuangkan air sedikit demi sedikit ke mulut dan hidung Ammar. Dia terus dihujani pertanyaan seputar keterlibatannya di jaringan terorisme. Sehingga suara Ammar pun megap megap. Tak pelak lagi begitu handuk itu dilepas,

Ammar muntah.

Begitulah cara interogasi dengan metode *waterboarding* diterapkan CIA untuk mengorek informasi.

Ada kala Ammar dengan posisi berdiri dan tangan terikat ditelanjangi di depan interogator wanita CIA.

Metode ini dikenal dengan sebutan *Sexual Humiliation*.

Ia juga sempat dipasangi kalung dan diseret seperti anjing. Hingga akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak seukuran badan dengan lubang untuk bernafas. Ini metode paling brutal hanya 6 dari 17 orang yang sanggup bertahan lebih dari 36 jam

Dokumen investigasi Komite Intelijen Senat AS terhadap metode interogasi CIA.



dalam kotak isolasi ini. Metode yang satu ini disebut *Sensory Deprivation*.

Kekejaman metode interogasi itu adalah cuplikan dari film Zero Dark Thirty. Film ini sempat menghangatkan suhu politik di Amerika. CIA bahkan menyebut adegan yang disajikan film itu palsu.

Selasa 9 Desember lalu menjadi akhir dari tindakan brutal CIA terhadap tahanan terorisme. Komite Intelijen Senat AS dipimpin senator Dianne Feinstein mempublikasikan hasil investigasinya terhadap metode interogasi CIA setelah peristiwa 11 September. Laporan setebal 528 halaman ini adalah ringkasan dari laporan utuh 6.200 halaman.

Pemerintah AS melalui Menteri Luar Negeri John Kerry sempat meminta senat menunda publikasi laporan tersebut.

“Karena banyak yang terjadi di dunia, dan ia ingin memastikan bahwa implikasi kebijakan luar negeri menjadi faktor soal waktu publikasi laporan ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, Jumat lalu.

“Termasuk upaya berkelanjutan yang kami hadapi (melawan Islamic



Senate Select Committee on Intelligence

Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Programs

Minority Views
Additional Minority Views

TOP SECRET [REDACTED] NOFORN



pihak berwajib pasca rentetan aksi terror pasca 11 September. Khalid Sheikh Mohammed alias Mukhtar, Abu Zubaydah, Ramzi bin al-Shibh, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, Lillie alias Mohammed Nazir Bin Lep, Walid bin Attash alias Khallad, Majid Khan, Abd al-Rahim al-Nashiri, Abu Faraj al-Libi, Zubair, Ahmed Khalfan Ghailani, Gouled Hassan Dourad, dan Ali Abd al-Aziz Ali. Khalid Sheikh Mohammed merupakan arsitek serangan teroris 11 September 2001 lalu. Total ada 113 tahanan selama program ini jalankan.

Direktur CIA **John Brennan** tidak dapat mengelak lagi dari

laporan senat. Ia mengakui ada sejumlah kesalahan dalam menjalankan program.

“Seperti disampaikan

dalam respons CIA atas studi tersebut, kami mengakui bahwa penahanan dan program interogasi memiliki kelemahan-kelemahan dan bahwa Badan ini melakukan kesalahan,” ujar Brennan dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/12).

Namun menyoal cara interogasi itu, Brennan berkila bahwa metode brutalnya justru telah banyak menyelamatkan nyawa dan mencegah praktik terorisme di sejumlah Negara. Menanggapi laporan tersebut Presiden Barack Obama menegaskan, Gedung Putih tidak akan mengulang kembali program penyiksaan terhadap tahanan yang dilakukan CIA.

“Ini memperkuat pandangan lama saya, yang selalu saya simpan, bahwa metode keras semacam ini tidak hanya inkonsisten dengan nilai-nilai bangsa kita, namun juga tidak sejalan dengan upaya pemberantasan terorisme yang semakin luas maupun dengan kepentingan keamanan nasional kita,” tegas Obama. ■

State) dan keselamatan orang Amerika yang disandera di seluruh dunia.” Ujarnya.

Seperti dikutip dari bocoran laporan Senat itu, aib CIA ini dimulai dari peristiwa 11 September 2001 saat Amerika diserang. Beberapa hari setelah serangan tersebut. Presiden George W Bush menandatangani perintah eksklusif untuk CIA yang berisi, atas anggota Taliban dan Al Qaeda, tidak diberlakukan pasal 3 konvensi Jenewa yang melarang perlakuan kejam terhadap tahanan untuk memperoleh informasi.

Sejak itulah CIA menjalankan program yang disebut dengan *Rendition, Detention and Interrogation*. Program ini disusun oleh dua mantan Angkatan Udara Amerika pemilik perusahaan Mitchell Jessen & Associates of Spokane. CIA membayar 80 juta USD kepada perusahaan jasa ini untuk program dari tahun 2002 sampai 2009.

Laporan itu menyebut program interogasi yang dijalankan CIA ini, sebenarnya modifikasi program militer Amerika yang dikenal dengan nama *Survival Evasion Resistance*

Escape (SERE). Setidaknya ada 11

metode penyiksaan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi.

Selain menjalankan program penyiksaan, CIA juga membangun penjara khusus di sejumlah Negara. Ada empat negara yang disebut, yakni Afghanistan, Polandia, Lithuania, Romania, Thailand. Juga ada 11 negara penyedia tempat interogasi untuk anggota CIA. Ada lagi puluhan negara yang menjamin kemudahan proses ekstradisi dan pertukaran informasi. Salah satu adalah Indonesia.

Dalam laporan itu ada sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebut-sebut. Bahkan Ridwan Isamuddin alias Hambali, tokoh Al Qaeda asal Cianjur, Jawa Barat menjadi bahasan khusus di dalam laporan ini. Hambali disebut sebagai target CIA nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Ia ditulis sebagai otak di balik teror bom Bali yang menewaskan 200 orang.

Hambali adalah satu dari 14 orang yang saat itu ditangkap oleh



John Brennan (foto bawah)

Kecewa PLTU Cidera Janji, Warga Blokir Jalur Pantura

Ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Paiton, Probolinggo, berunjuk rasa dengan memblokir jalur pantura di depan PLTU Paiton, Senin (22/12). Mereka mengecam kebijakan Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang tidak berkomitmen tentang lelang limbah besi tua.

Koordinator aksi Suhairiyanto menyebutkan bahwa sebelumnya lelang limbah besi tua langsung diberikan kepada warga desa yang berada di ring 1 PLTU, namun sekarang dilelang secara terbuka, sehingga warga tak kebagian lelang tersebut."PJB tak komitmen atas kesepakatan yang



sudah disepakati," kata dia.

Pihak PLTU juga dinilai kerap melakukan PHK terhadap warga di sekitar PLTU, sehingga pengangguran bertambah di daerah tersebut. Unjuk rasa ini diikuti warga sejumlah desa di Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Sempat terjadi saling dorong warga dengan anggota kepolisian yang berjaga, karena warga memaksa masuk ke areal PLTU. / Karel Stefanus Ratulangi



Korupsi Dana Masjid dan Gereja, Eks Bupati Kendal Terancam Bui 6 Tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menuntut mantan Bupati Kendal, Siti Nur Makesi, hukuman enam tahun penjara. Siti diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial tempat ibadah dari APBD tingkat II tahun 2010.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Maliki, Kamis (18/12), terdakwa diduga terbukti melanggar Pasal

3 junto pasal 18 KUHP UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah pada pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.

Jaksa meminta terdakwa mengembalikan uang negara senilai Rp1,2 miliar dari hasil penyelewengan dana bantuan sosial. Bilamana terdakwa tidak sanggup mengembalikan paling lambat 1 bulan setelah putusan, maka seluruh harta benda akan disita negara.

Dalam kasus ini, terdakwa diduga telah menyelewengkan dana bantuan sosial tempat ibadah masjid dan gereja yang bersumber dari APBD tingkat II TA. 2010. Rinciannya, proposal Mushola sebanyak 28 buah dan proposal Masjid dan Gereja sebanyak 30 buah.

"Proposal-proposal permohonan dana Bansos keagamaan difiktifkan. Proses pencairan dana tersebut melalui rekening Pemkab Kendal, namun dalam teknis pencairan dan pelaksanaannya telah disalahgunakan," ungkap Maliki.

Sidang rencananya akan dilanjutkan 8 Januari 2015 mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa (pledoi). / Karel Stefanus Ratulangi

Positif Gunakan Narkoba, Puluhan PNS Pemprov Sumut Terancam Dicopot



Lima belas pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara positif menggunakan narkoba.

Hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumut, Kamis (18/12), menunjukkan para pegawai yang dibiayai negara tersebut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja.

Dari 15 pegawai, tercatat 6 pegawai diketahui sebagai pengguna narkoba kategori berat, dan sisanya merupakan pengguna kategori ringan.

Kepala BNP Sumut Kombes Pol Rudy Trengono mengatakan, 15 dari 1.338 pegawai yang mengikuti tes urine, nanti akan direhabilitasi selama dua pekan. Rehabilitasi ini akan disesuaikan dengan kategori penggunaan narkoba. Apa kategori berat atau sebaliknya ringan.

Sementara Kepala BKD Pemprov Sumut, Pandapotan Siregar, mengatakan, 15 PNS pengguna narkoba itu akan dijatuhi sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.

"Selain itu penurunan jabatan selama 3 tahun yang diberikan kepada PNS yang memiliki jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan," kata Pandapotan.

Rencananya, tes urine ini akan digelar rutin selama 3 tahun ke depan. / Karel Stefanus Ratulangi

Anggarkan Metro TV Rp 1,4 miliar, Pemda NTT Cederai Media Lokal

Alokasi anggaran untuk Metro TV yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 1,4 miliar, dinilai mencedera keberadaan media lokal di NTT.

DPRD NTT menolak tegas pengalokasian dana itu. Sebaliknya DPRD mendukung operasionalisasi rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Untuk apa perusahaan sebesar Metro TV dibantu dengan dana sebesar itu. Sementara media lokal tidak diperhatikan, bahkan justru diabaikan oleh pemerintah daerah,” kata pengamat kebijakan publik,



Viktus Murin kepada Aktual, Kamis (18/12).

Pemda NTT, sejak dulu cenderung mengabaikan keberadaan media lokal yang selama ini berkontribusi untuk pembangunan daerah. Alokasi anggaran bagi Metro TV juga membuktikan Pemda NTT tidak peduli terhadap krisis kemiskinan yang melanda masyarakat NTT.

Penolakan dari dewan, tercatat datang dari enam fraksi masing-masing dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN serta PKS.

Mereka menyampaikan penolakannya dalam pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTT Tahun Anggaran 2015 pada rapat paripurna Dewan di Kupang, Rabu (17/12). / Karel Stefanus Ratulangi



Jokowi dan 36 Dubes akan Hadiri 10 Tahun Tsunami Aceh

Presiden Joko Widodo dan 36 duta besar negara sahabat dipastikan menghadiri peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Kepastian itu disampaikan Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan kepada Aktual.co, Minggu (21/12).

Setda telah menerima konfirmasi kehadiran presiden

ketujuh tersebut. Selain itu, panitia peringatan 10 tahun tsunami Aceh terus bekerja mempersiapkan rangkaian acara. Rangkaian acara memperingati tsunami Aceh akan dilangsungkan pada 25-30 Desember 2014.

Sejumlah kegiatan seperti zikir bersama yang dipimpin Ustaz Syeh Ali Jaber, lomba lari 10 K,

expo kebencanaan, parade film dokumenter, malam seni budaya dan pameran foto, digelar untuk peringatan bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam.

Ketua panitia, Tomy menyebutkan Singapura telah mengirimkan kabar akan mengirimkan dua menteri untuk menghadiri acara tersebut. “Selain itu, 36 duta besar negara sahabat untuk Indonesia telah mengkonfirmasi akan hadir,” pungkasnya. / Karel Stefanus Ratulangi

Body Guard Pelintas Batas

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

Ini bukan sekedar kisah Robin Hood atau Body Guard maupun Dances With Wolves. Namun ekspresi kemaukan seorang sineas atas sikap picik kelompok yang merasa diri paling benar. Kepicikan yang memperanakan kefanatikan kelompok. Syahdan anggota kelompok pun dibuai dengan ilusi seolah terunggul, seraya melecehkan kelompok lain. Tak jarang malah dinista secara berantai antar generasi. Dongeng yang melabel buruk kelompok pesaing pun distereotipkan turun temurun.

Sejak bayi, anggota kelompok dicekoki pandangan keliru. Padahal tak pernah ada seorangpun bisa memilih, apa boleh lahir sebagai lelaki atau perempuan, di keluarga suku bangsa mana, atau beragama apa. Lalu begitu lahir kok langsung dibenahi cara pandang beraroma dengki atas kelompok lain. Entah itu kelompok agama, ras, aliran, maupun kelas apapun.

Adalah Kevin Costner, sineas konsisten yang menerabas semua sekat budaya penanaman kebencian antar kelompok. Bukan cuma batas budaya, politik, agama atau kelas sosial. Costner malah menjungkirbalikkan persepsi yang selama ini dibenam di benak khalayak, yang disuburi agitasi dan propaganda pelbagai media.

Tonton Dances With The Wolves karya Costner, sutradara dan pemeran John Dunbar, letnan kulit putih veteran perang saudara, yang terpikat keluhuran sikap suku bangsa Indian. Costner meluluhlantakan stempel Indian itu buas dan biadab. Melalui keindahan sekuen demi sekuen, kelincahan bahasa sinematografis, tanpa demagogi dan sikap menggurui, dia menyentak khalayak bahwa keunggulan peradaban kulit putih ternyata lebih bual katimbang hasil akal.

Film peraup 424juta USD dan tujuh Academy Award ini memang laik dipuji. "Dances with Wolves is a clear-eyed vision. Authentic as an Edward Curtis photograph, lyrical as a George Catlin oil or a Karl Bodmer landscape, this is a film with a pure ring to it," tulis Sheila Benson, kritikus dari the Los Angeles Times.

Nilai lebih mahakarya tahun 1990 ini bukan melulu capaian sinematika, tapi sukses Costner membedah tata pikir dan wawasan keliru kita. Prestasi yang diulangi dalam karya berikut, Robin Hood: Prince of Thieves. Pada film berlatar Perang Salib III dan kondisi Inggris semasa Richard The Lion Heart ini, Costner mengintroduksi Azeem, muslim kulit hitam bangsa Moor, rekan juang Robin Hood.



Melalui Azeem yang diperankan Morgan Freeman, tersirat konsistensi Costner mendobrak semua bentuk kejumuhan politik identitas. Khalayak terperangah atas tafsir segar Costner. Betapa Islam juga berarti loyalitas dan konsistensi sikap. Beberapa adegan pun mencerminkan bahwa

peradaban Muslim semasa itu telah melebihi Eropa. Dari penggunaan teropong maupun teknologi persalinan. Termasuk pula scene kekonyolan masyarakat awam Eropa yang terwakili oleh perempuan pengikut Robin saat bertanya kepada Azeem, musabab kenapa dia berkulit hitam: "Did God paint you?"

Penjebolan perspektif keliru melalui Robin Hood karya sinematografi 1991, dilanjutkan Costner dalam film Body Guard produksi 1992. Berpartner dengan penyanyi bersuara emas, Whitney Houston, pemeran artis kaya raya yang membutuhkan jasa body guard, Costner mendobrak stereotip publik. Jika selama ini dikesanakan majikan selalu berkulit putih yang dijaga ketat body guard berkulit hitam bertampang garang, kali ini diputar 180 derajat. Yang kaya dan berposisi boss justru kulit hitam. Perempuan pula. Sebaliknya kulit putih yang good looking malah cuma centeng. Itulah Frank Farmer yang diperankan apik oleh Costner.

Sekilas yang diperjuangkan Costner telah berlangsung hampir setengah abad lalu. Lantas bagaimana dengan dunia tempat para khalayak penonton film yang sempat menikmati karya dan pesan sinematografis Kevin Costner?

Ternyata bukan The Thrill is Gone seperti yang disenandungkan musisi blues BB King. Peristiwa peruntuhan dua menara kembar simbol 'keangkuhan kapitalisme' ternyata malah memicu arus baru politik identitas dan memperkuat sikap stereotip masyarakat. Bahkan media dunia pun terjebak mengentalkan kembali sikap stereotip kelompok masyarakat dengan mengeksplosi label 'teroris Islam' bagi para pembajak pesawat yang digunakan untuk menabrak kedua menara tersebut. Label itu ditujukan bagi sosok yang tidak sefaham dan sehaluan dengan kepentingan kapitalisme kulit putih.

Lebih memprihatinkan, sikap semakin mengentalkan identitas dan stereotip hari hari ini pun terasakan kian memperengap keseharian hidup sosial budaya Indonesia. Gagal faham kini bagi menjalar ke semua jajaran kehidupan kita. Lantas kapan kita bergerak maju dengan akal sehat dan budaya penalaran yang jernih? ■

Memperkuat Daya Saing Industri Dengan Gas Bumi

“Berkat biaya energy yang lebih murah, sektor industri yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor.”



Mulai tahun 2015 Indonesia akan memasuki babak baru dalam konteks persaingan usaha dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Pelaksanaan AEC secara otomatis akan mendorong perdagangan menjadi semakin terbuka. Lalu lintas barang dan jasa dari berbagai negara ASEAN berpotensi untuk membanjiri pasar Indonesia.

Sebagai negara terbesar dengan 237 juta penduduk plus perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia pasti akan menjadi target pasar bagi produk-produk para pelaku usaha dari berbagai negara di kawasan ini. Untuk menghadapi AEC, penguatan daya saing akan menjadi salah satu kunci sukses sektor usaha di Indonesia dalam berkompetisi dengan kompetitornya dari ASEAN.

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan pemerintah dan para pengusaha nasional untuk memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri. Diantaranya dengan menggunakan energi yang lebih efisien dan sumbernya tersedia sangat besar di Indonesia yaitu gas bumi.

Dengan harga gas bumi yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) industri, para pengusaha mampu menekan beban biaya, sehingga harga produknya ketika sampai di pasar masih sangat kompetitif.

Hingga saat ini ribuan perusahaan dari berbagai industri telah memanfaatkan gas bumi dengan menjadi pelanggan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Sektor industri yang telah melakukan konversi ke gas bumi seperti industry

kimia, keramik, makanan, tekstil, semen dan listrik. Gas bumi PGN ini mengalir melalui jaringan pipa yang dibangun secara mandiri oleh PGN di berbagai wilayah seperti Medan, Batam, Bekasi, Kerawang, Surabaya, Gresik hingga Malang di Jawa Timur.

Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, dengan menggunakan gas bumi para pelanggan PGN mampu melakukan penghematan biaya energy yang sangat besar. Sebagai contoh pada tahun 2013 PGN menyalurkan gas bumi ke sektor industri, UKM dan rumah tangga sebanyak 827 MMSCFD atau setara dengan 145 ribu barel minyak per hari. Maka dalam setahun nilai penghematan yang bisa dilakukan dengan memakai gas bumi mencapai Rp 55 triliun.

Berkat biaya energi yang lebih murah, sektor industry yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor.

“Sebagai BUMN yang telah membangun infrastruktur dan menyalurkan gas bumi, PGN memiliki komitmen untuk memperbesar pemanfaatan gas bumi ini, sehingga akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional,” jelas Irwan.

Irwan menambahkan, pemanfaatan gas bumi juga terbukti mampu mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak. Misalnya penggunaan gas bumi bagi pembangkit listrik berbasis gas milik PLN. Itu sebabnya, PGN kini terus berusaha mempercepat proyek pipanisasi gas dari lapangan gas Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah. “Dengan menggunakan gas bumi, PLTGU Tambak Lorok akan mampu menghemat biaya energy hingga Rp 2 triliun per tahun dan mengurangi subsidi pemerintah,” tandas Irwan.

Saat ini PGN telah membangun lebih dari 6000 kilometer jaringan gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia. PGN juga menyalurkan gas bumi kepada sektor transportasi, UKM dan rumah tangga dengan tingkat efisiensi dan keamanan yang teruji dan terbukti.

MAJALAH DIGITAL AKTUAL



Klik www.aktual.co untuk pemesanan majalah **Aktual** versi digital

m.aktual.co
www.aktual.co

<http://www.facebook.com/aktualco> 

<http://www.twitter.com/Aktualco> 